

**INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK  
DI WARUNG KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK  
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:  
**Mirza Ronda**  
**PS Doktor Ilmu Komunikasi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor  
dalam bidang Ilmu Komunikasi di Prodi DIK - SPs Usahid**



**Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid  
PS Doktor Ilmu Komunikasi  
Jakarta – 2013**



M. Ronda

**INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK  
DI WARUNG KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK  
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:  
**Mirza Ronda**  
**PS Doktor Ilmu Komunikasi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor  
dalam bidang Ilmu Komunikasi di Prodi DIK - SPs Usahid**



**Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid**  
**PS Doktor Ilmu Komunikasi**  
**Jakarta -- 2013**



**INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK  
DI WARUNG KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK  
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:  
**Mirza Ronda**  
**PS Doktor Ilmu Komunikasi**

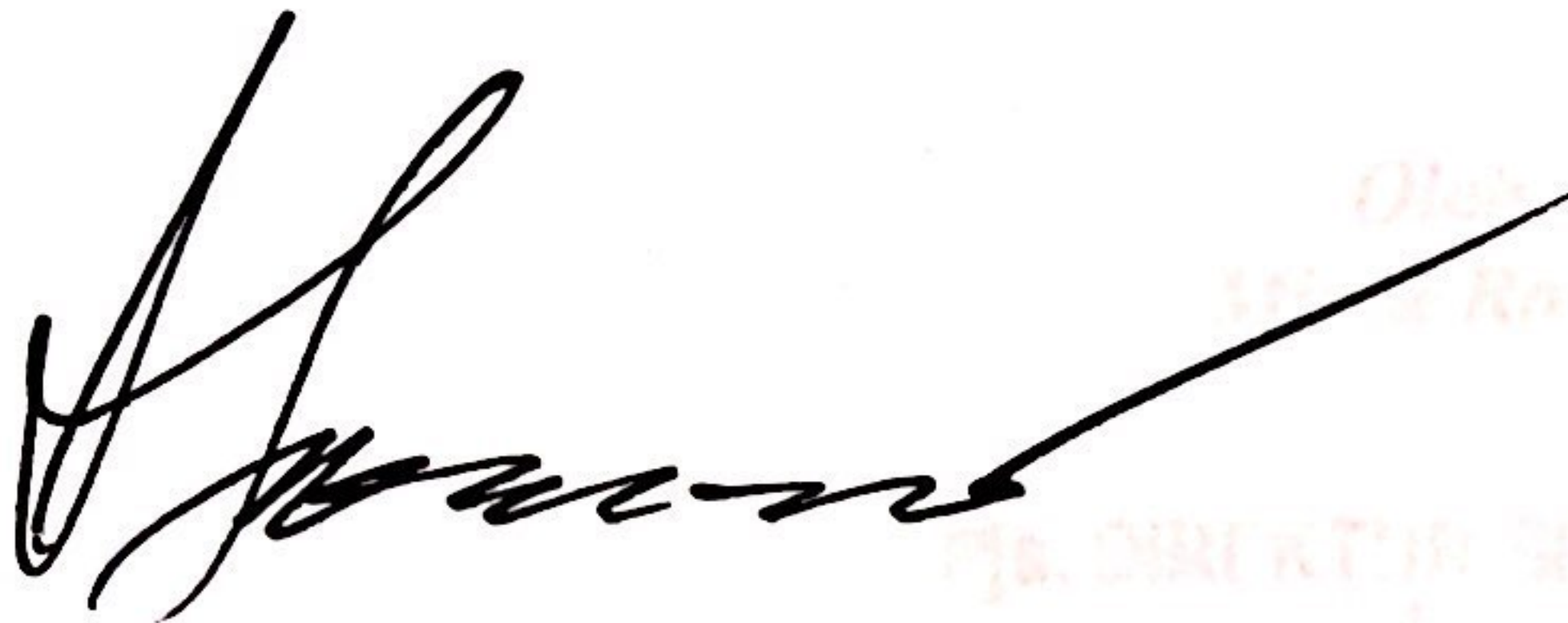
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor  
dalam Ilmu Komunikasi di SPs Usahid**

**Sekolah Pascasarjana Univeritas Sahid  
PS Doktor Ilmu Komunikasi  
Jakarta – 2013**



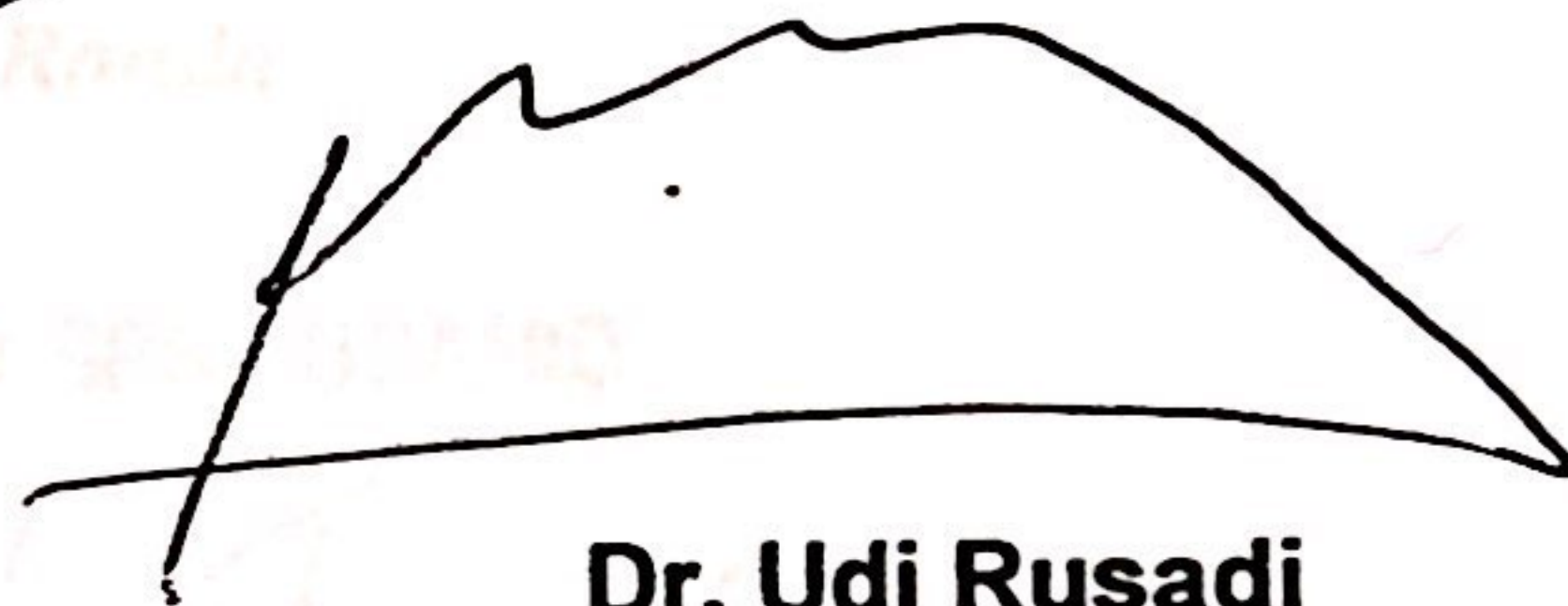
**LEMBAR PENGESAHAN  
DALAM RANGKA SIDANG TERBUKA  
SPS – PRODI DIK – USAHID JAKARTA  
Jakarta, Januari 2014**

**PROMOTOR**



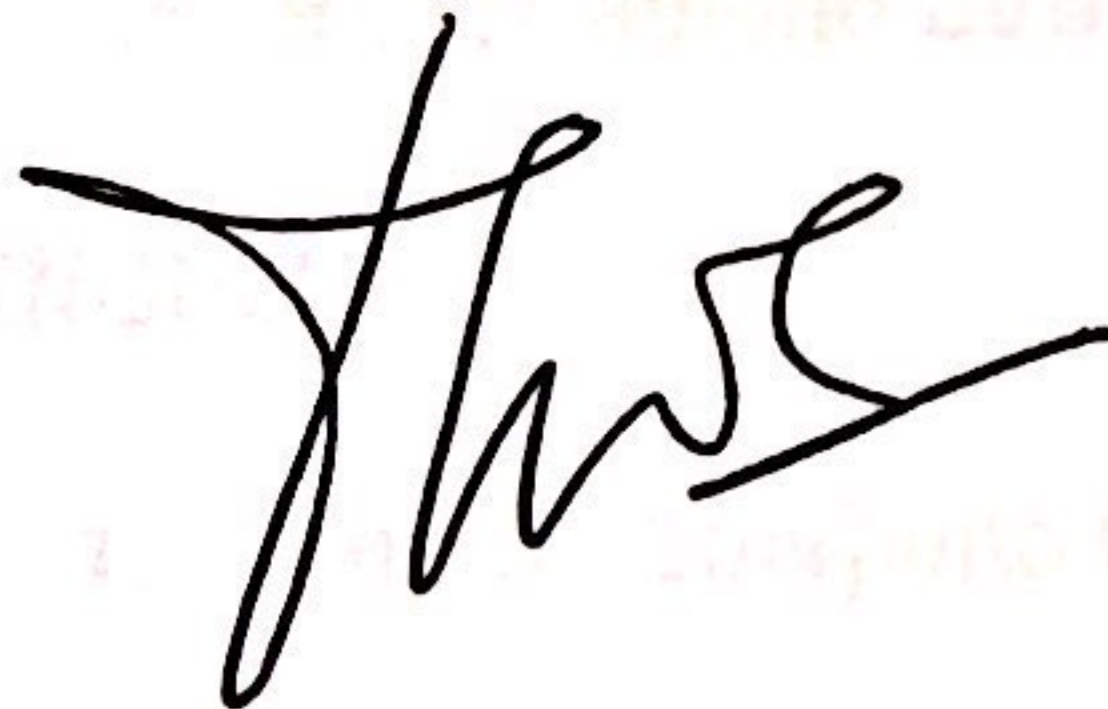
**Prof Dr. Harsono Suwardi, MA**

**CO - PROMOTOR**



**Dr. Udi Rusadi**

**Pjs. DIREKTUR  
SPS - USAHID  
(Sekertaris Sidang)**



**Dr. Titi Widaningsih, M.Si**

**Rektor USAHID Jakarta  
(Ketua Sidang)**



**Prof Ir. Toni Atyanto Dharoko, M.Phil, Ph.D**

**Nama : Mirza Ronda**

**NPM : 200732330005**

**Tgl Sidang Terbuka : 29 Januari 2014**



**LEMBAR PENGESAHAN UNTUK SIDANG TERTUTUP**  
**(Pra-Promosi Doktor)**  
**Di SPS – PRODI DIK – USAHID JAKARTA**  
**Jakarta, Desember 2013**

**JUDUL PENELITIAN**  
***Intervensi Terhadap Kebijakan Publik Di Warung Kopi***  
***sebagai Ruang Publik Di Kota Makassar***

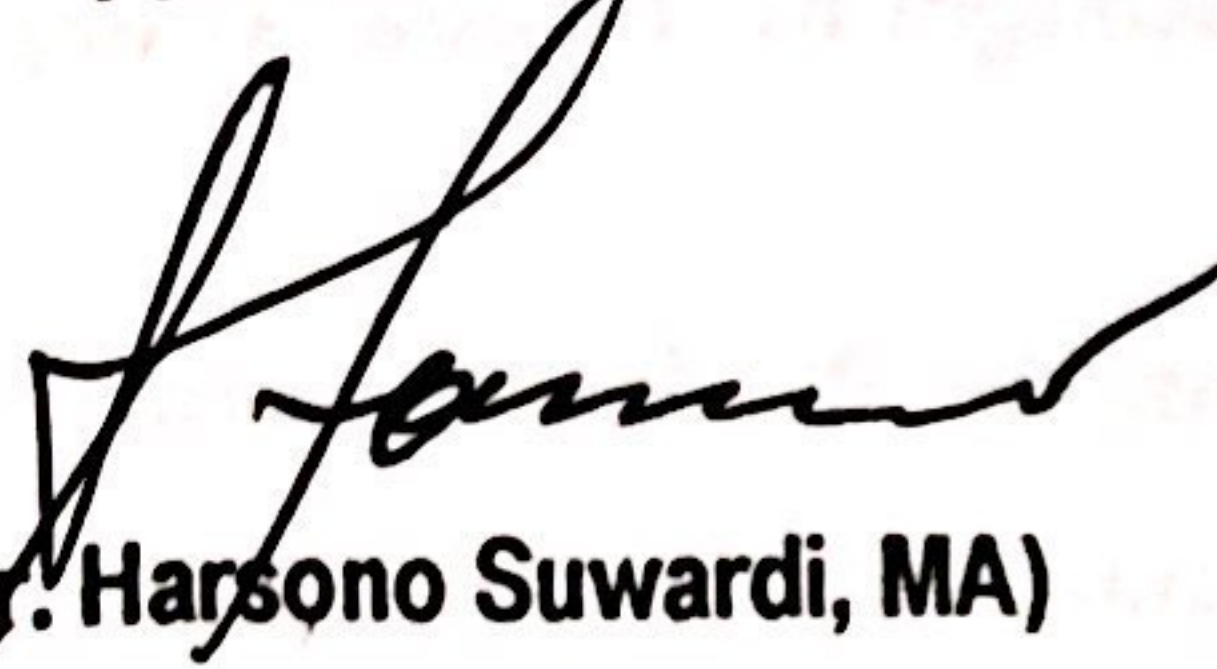
**Oleh:**  
**Mirza Ronda**

**Pjs. DIREKTUR SPS - USAHID**



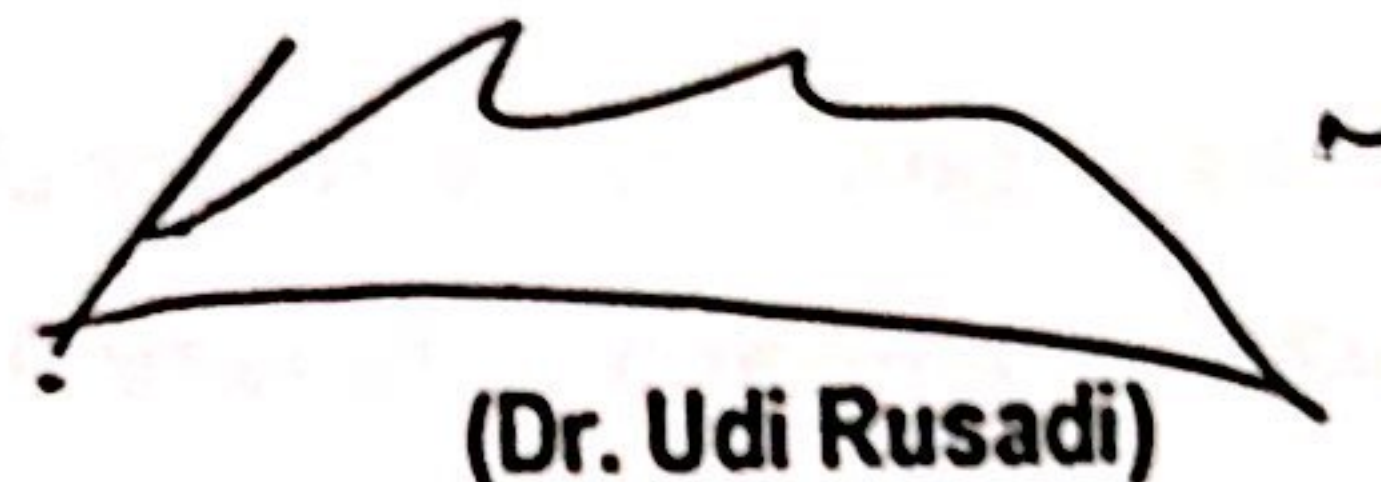
**(Dr. Dra. T. Titi Widaningsih, M.Si)**

**PROMOTOR**



**(Prof Dr. Harsono Suwardi, MA)**

**CO - PROMOTOR**

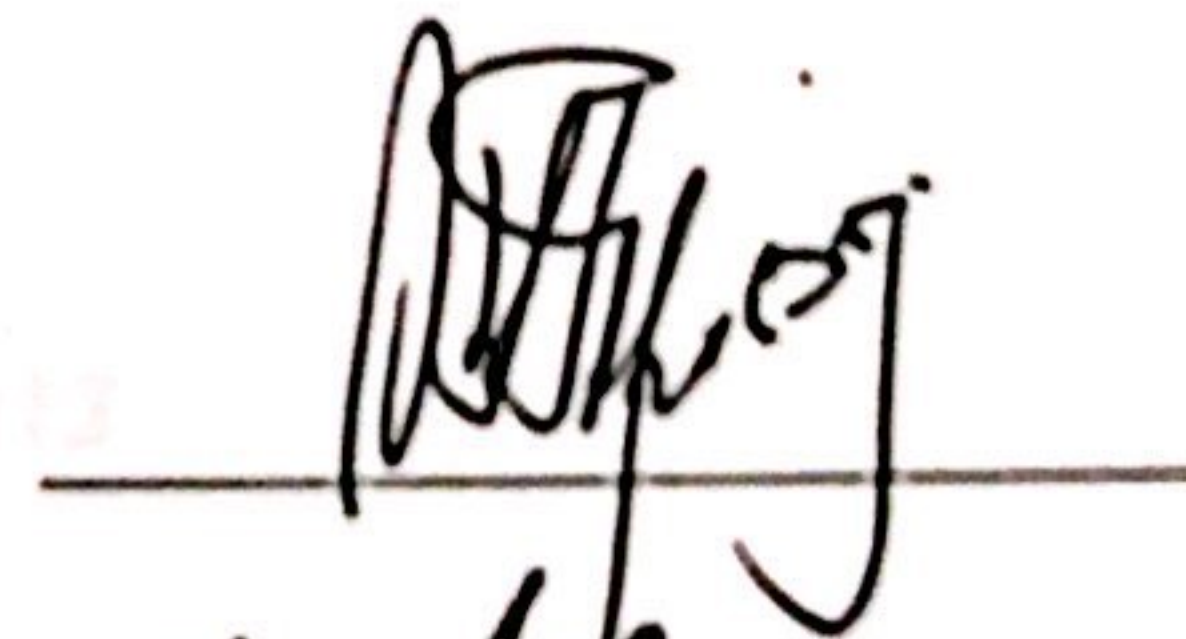


**(Dr. Udi Rusadi)**


**ttd**

**PENGUJI :**

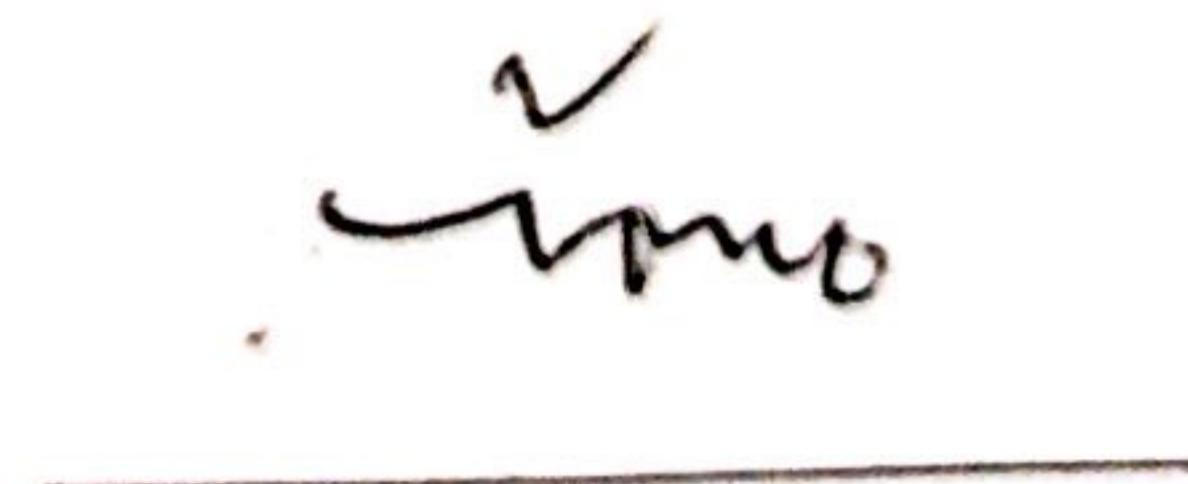
**1. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo**



**2. Prof Dr. Santoso S Hamidjojo**



**3. Dr. Setiono S Ecip**



**4. Dr. Mikael Dua**





**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA  
PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

***Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang sudah mengikuti ketentuan dalam penulisan karya ilmiah.***

***Apabila dikemudian hari di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

**Jakarta, 30 Agustus 2013**

**METERAI  
TEMPEL**  
PALANG NEGARA RI BANGSA  
TGL. 20  
**7F34FACF084167125**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**  
**Mirza Ronda**  
**(2007 3232 0005)**



## ***Lembar persembahan***

***Karya ini saya persembahkan kepada Papa' (Andi Allan Ronda - alm) dan Mama' (Andi Nani Sapadawette – alm).***

***Tarima kasih atas dedikasi dan kepercayaan yang diberikan kepada kami (anak-anaknya).***

***Doa dan ketulusan kalian dalam mendidik telah membentuk seorang anak seperti saya.***



# INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI WARUNG KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK DI KOTA MAKASSAR

Mirza Ronda – 200732330005

xii + 5 Bab + 230 Hal. + Gambar + Lampiran + 44 Bibl (1975 – 2010)

Warung kopi di kota Makassar, <sup>bagai latar belakang</sup> berbagai latar belakang <sup>berkumpul</sup> berkumpul untuk membicarakan berbagai permasalahan yang ada, baik di tingkat kota Makassar, Sulawesi Selatan, <sup>Maupun issue-issue yang bersifat</sup> nasional, bahkan internasional. Masalah Penelitian ini <sup>ingin</sup> mengkaji secara mendalam, bagaimana proses diskursif yang berlangsung di warung tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik? Deskripsi aktor yang terlibat dalam proses diskursif tersebut? <sup>Serta</sup> mengkaji lebih mendalam latar belakang historis kemunculan warung kopi sebagai ruang publik alternatif bagi masyarakat kota Makassar dalam menyalurkan berbagai pendapatnya. Rumusan masalah penelitian ini <sup>sebagai berikut:</sup> "Bagaimana praktek intervensi kebijakan publik oleh para aktor di warung kopi kota Makassar dalam mendiskusikan kepentingan publik?"

Paradigma penelitian ini adalah Paradigma Kritis, yakni paradigma yang menginginkan ilmuwan harus bertanggung jawab, dengan tidak menyederhanakan gambaran tentang dunia sosial tetapi hendaknya ilmuwan dapat bekerja sebagai agen yang aktif dalam membentuk kembali dan menciptakan perubahan yang radikal dalam kehidupan masyarakat. <sup>Dipahami bahwa</sup> konteks penelitian ini ialah komunikasi sosial yang terjadi di warung kopi yang merupakan salah bentuk ruang publik. Dengan menggunakan pendekatan teori tindakan komunikasi yang dikemukakan oleh Habermas, generasi kedua dari tradisi <sup>menginginkan</sup> menginginkan komunikasi yang bersifat *emansipatory* yang bebas dari eksploitasi atau penekanan yang merupakan <sup>merupakan</sup> kelanjutan dari pemikiran Marx, yang melihat manusia dalam pekerjaan. Habermas berpandangan bahwa orang memanusiakan dirinya melalui interaksi. Hanya dengan komunikasi dan interaksi manusia dapat menguasai masyarakat, membentuk gerakan sosial, dan meraih kekuasaan.

Habermas menyatakan bahwa diskursus adalah bentuk komunikasi yang "aneh dan tidak nyata" dimana partisipan mengikat diri mereka pada "kekuatan argumen yang lebih baik tanpa ada paksaan," dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang kevalidan atau ketidakvalidan klaim-klaim (idea-idea) yang menjadi persoalan. Dalam proses tersebut diandaikan kalau mewakili "konsensus rasional," yaitu kesepakatan dicapai (yang akan menjadi pendapat umum) bukan karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu atau keistimewaan situasi yang dihadapi, namun semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan. Sehingga supaya komunikasi apa pun dapat berhasil orang harus berbicara **jelas, benar, jujur, dan tepat.**

Berikut Habermas



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan etnometodologi, yakni pendekatan yang memperlakukan realitas obyektif sebagai hasil yang interaksional dan diskursif; deskripsi, cerita, atau laporan tidak semata-mata berkisah tentang dunia sosial, ketiganya adalah unsur pembentuk dari dunia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari sisi prosedur, sebuah penelitian etnometodologi, harus selalu disesuaikan dengan wacana dan interaksi yang berlangsung secara alami seiring dengan berlangsungnya penelitian terhadap unsur pembentuk setting/konteks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran warung kopi di kota Makassar sebagai ruang publik, ruang bertemunya beragam kepentingan berbagai pihak, sekaligus menjadi tempat melakukan pengujian terhadap validasi ujaran berbagai kelompok kepentingan, memberikan ruang pada kelompok-kelompok yang selama ini memiliki akses yang terbatas atau tidak memiliki akses sama sekali untuk menggunakan media konvensional, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kelompok ini seakan menemukan oase digurun pasir, yakni warung kopi sebagai tempat untuk menyampaikan dan sekaligus memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang selama ini cenderung diabaikan, yakni kepentingan masyarakat akar rumput. Artinya, telah terjadi transformasi masyarakat di kota Makassar, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi kelompok yang selama ini dipandang sebelah mata oleh kelompok penguasa, yakni kelompok-kelompok LSM dan media untuk melakukan diskusi diskusi rasional yang bersifat publik di warung kopi. Fenomena ini tidak terlepas dari bergulirnya roda reformasi di Indonesia, yang membawa perubahan terhadap kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapatnya.

Sisi positif dari kehadiran warung kopi sebagai arena diskusi publik, dapat dipandang sebagai *trigger* terhadap diskusi-diskusi tentang kebijakan publik yang diharapkan dapat menyentuh kepentingan publik, yang selama periode rezim Orde Baru, hal ini nyaris tidak dimungkinkan terjadi atau bahkan tidak diperkenankan. Namun dapat saja, diskusi-diskusi di warung kopi tersebut ternyata membawa kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok penguasa, guna melanggengkan kuasa. Sehingga analisis lebih lanjut, tentang bagaimana kelompok-kelompok LSM tersebut menggunakan warung kopi sebagai ruang publik untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni kelompok penguasa, menjadi penting. Jika kelompok LSM ini, sebagai salah satu kekuatan kontrol dalam masyarakat, tidak berhasil atau gagal dalam melakukan hegemoni tandingan, atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang mengendalikan kuasa, maka yang terjadi adalah semakin kuatnya cengkraman kelompok hegemon tersebut, sehingga tidak akan terjadi pluralisme opini.

Kata Kunci: *Tindakan Komunikasi, Ruang Publik, Demokrasi, dan Opini Publik.*



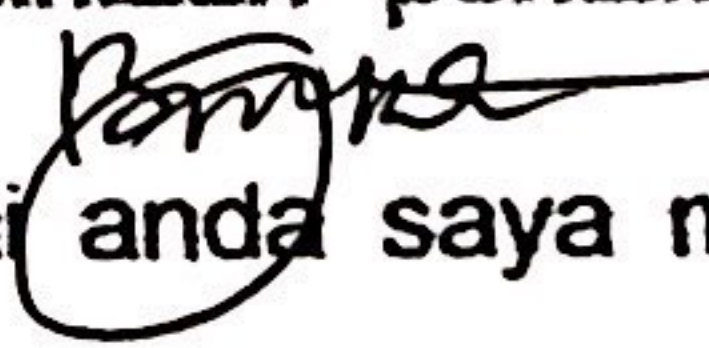
## PRAKATA

*Syukur Alhamdulillah*, penulis haturkan kehadiran Allah swt pencipta semesta alam beserta segala isinya. Semata-mata karena ridha-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul ***Intervensi terhadap Kebijakan Publik Di Warung Kopi sebagai Ruang Publik Kota Makassar***, yang diujikan di depan sidang terbuka Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid, Jakarta, sebagai satu syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi.

Dalam proses perjalanan meraih gelar doktor, mulai dari mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, di saat berlangsungnya proses belajar di bangku perkuliahan, sampai dengan proses untuk menyelesaikan studi, penulis mendapatkan banyak tantangan dan rintangan baik yang bersifat teknis maupun yang non-teknis. Dalam menghadapi hal tersebut, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA. selaku promotor dan sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, yang tidak pernah bosan mengarahkan, membimbing, sekaligus memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi. Tidak ada kalimat yang tepat untuk melukiskan dedikasinya terhadap profesi dan mahasiswanya. Dalam diri beliau kami menemukan pribadi seorang guru yang mendidik, ayah yang mengayomi, teman yang dapat memahami, rendah hati dan sangat menghargai perbedaan. Terima kasih. *Prof is the best lecture.*



2. Dr. Udi Rusadi, Co-promotor yang membuka wawasan peneliti tentang dunia ilmu pengetahuan semenjak di bangku kuliah S1. Terima kasih atas arahan, bimbingan, diskusi-diskusi yang sangat bermakna. Beliau banyak mewarnai pemahaman penulis terhadap subjek yang diteliti.
3. Prof. Dr. Suryanto Puspwardojo dan Dr. Mikael Dua, yang menyediakan waktunya sebagai penguji maupun mendiskusikan isi disertasi ini. Namun yang terpenting merupakan peletak pemikiran filsafat dalam benak mahasiswa Prodi Doktor Ilmu komunikasi, SPs Usahid, Jakarta. Terima kasih telah mewarnai pemikiran kami dalam menulis disertasi.
4. Terima Kasih kepada Dr. Setyono Sinansari Ecip dan Dr. Arif Subhan, yang bersedia menyediakan waktunya sebagai penguji dan memberikan kritikan, saran-saran yang konstruktif terhadap penyempurnaan penulisan disertasi ini.
5. Para Dosen Prodi DIK SPs Usahid, Prof. Santoso S Hamidjoyo, Dr. Pinkey Triputra, Dr. Sunarto, Dr. Turnomo Raharjo, Terima Kasih atas ilmu pengetahuan yang telah dibagikan.
6. Tidak lupa kepada Bapak Drs. Ali Mochtar Hoeta Soehoet (alm.), yang telah menanamkan kecintaan penulis terhadap ilmu komunikasi dan profesi pengajar, melalui  anda saya memperoleh kunci untuk membuka pintu ilmu pengetahuan komunikasi.
7. Terima kasih kepada Prof DR. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono beserta ibu yang memberikan kepercayaan berupa beasiswa S3 kepada penulis.
8. Demikian juga dengan Rektor Usahid beserta Jajarannya dan Dekan



- Fikom Usahid. Terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis, selama proses mengikuti perkuliahan.
9. Tidak lupa juga penulis menghaturkan terima kasih kepada mantan Direktur SPs – Usahid; Prof Budi, Prof Yu, dan Prof Gi, atas bantuan dan kemudahan selama menempuh perkuliahan.
  10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. H. Sowam Masjuri, SU, Ir.H. Farhat umar, M.Si., dan Navia Ariani, SE., M.Si. yang sangat membantu dan perjuangan penulis untuk mendapatkan beasiswa program doktor.
  11. Kawan-kawan LSM di kota Makassar, Pontianak, Jakarta; Bang Mul, sdr. Qudri, Siswan, Alfian, Bang Dul, Ical, Mas Gun dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan anda yang menjadi nara sumber dan teman diskusi selama peneliti melakukan penelitian di kota Makassar. Juga atas bantuannya mempertemukan dengan nara sumber penting lainnya. Kepada Syarifudin Bahrum, Andy Mangara, Yosi, Pahir Halim, Nurkrompot, terima kasih atas diskusi dan kesediaan anda menjadi nara sumber penelitian ini.
  12. Teman-teman; dosen dan karyawan baik di Fikom maupun SPs Usahid, terima kasih atas pengertiannya pada kesibukan peneliti selama menyelesaikan studi.
  13. Sahabat sekaligus *Kakang* yang sangat baik bagi penulis, Drs. Nandang Mulyasentosa, MM., M.Si., Terima kasih atas diskusi-diskusi dan wejangannya serta perspektifnya dalam memandang ilmu pengetahuan.



14. Sahabat sekaligus Pejabat Direktur SPs Usahid, Dr. Titi Widaningsih. Terima Kasih atas bantuan materil, moril dan pengertiannya pada kesibukan penulis dalam menyelesaikan studi..
15. Sahabat-sahabat di Prodi DIK SPs Usahid, Mas Wempy (Dr. JA Wempy) , Mas Andre (Dr. Andre Ihksano), Ustad Jamal, Mas Toto (Kapten Toto Subandoro), Mas Agung (Letkol Penerbang Agung Sasongkojati), Rubi, Eyang Subur (mas Tri), Diana, Yoyoh, Dr. Nunung dan banyak lagi yang lainnya yang tak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas diskusi-diskusi yang kita lakukan, masukan-masukan kalian, dan juga mimpi-mimpi yang kita bangun bersama untuk memajukan Prodi DIK SPs Usahid.

Terakhir dan yang terutama sekali, keluarga besar penulis; Mama' (alm.) yang hanya berkesempatan menyaksikan penulis kuliah pada semsester I dan Papa' (alm) yang sangat berkeinginan menyaksikan penulis dalam sidang terbuka. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan menanamkan pentingnya pendidikan tinggi dalam diri penulis. Istriku (Dra. Karlina Sutaprawira), anak-anakku (Ade Dala Marlina dan Andi Anisa Amalia Marlina), Abang (Ir. Andi Juan Akbar Ronda, MM) dan Adikku (Andi Ningke Allan Ronda), dan Paman (Prof. Dr. H. Andi Baso Ronda, Drs. Andi Makmur Makka, MA. dan Andi Nur Lela). Terima kasih atas pengertian dan motivasinya.

Insyallah anugerah yang diberikan Allah swt, membentuk penulis menjadi insan amanah dan arif dalam memandang dan mengarungi kehidupan. Semoga Allah swt senantiasa menjadi pengarah langkahku. Amin.



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Permasalahan dan Tujuan Penelitian .....	15
c. Penelitian Tentang Ruang Publik .....	17
d. Signifikansi Penelitian .....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
a. Paradigma Kritis .....	23
b. Komunikasi Sosial dan Ruang Publik .....	42
c. Teori Tindakan Komunikasi Habermas .....	48
d. Opini Publik dan Warung Kopi .....	57
e. Kritik Ideologi, Mitos dan Rasionalitas dalam Masyarakat .....	75
<b>BAB III METODOLOGI</b>	
a. Etnometodologi .....	97
b. Tehnik Kumpulkan data .....	102
c. Analisis Data .....	105
d. Kualitas Penelitian .....	107
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b>	
<b>A. Deskripsi Data</b>	
a. Sekilas tentang Kota Makassar .....	111
b. Arti Warung Kopi bagi Masyarakat Kota Makassar .....	122
c. Warkop sebagai Ruang Publik di Kota Makassar .....	126
d. Warkop sebagai Arena Demokrasi & Pengembangan Opini Publik .....	134
e. Warkop sebagai Ruang Pengaruh Kebijakan Publik .....	143
f. Warkop sebagai Tempat Pelarian masalah Domestik .....	149
g. Warkop sebagai Ajang Bisnis .....	151
h. Perempuan dan Warung Kopi .....	154



i. Mitos Tudang Sipulung dan Diskusi Warung Kopi .....	158
<b>B. Analisis Data</b>	
a. Rasionalitas Komunikasi di Warung Kopi Kota Makassar .....	167
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
a. Kesimpulan .....	183
b. Implikasi Penelitian .....	189
c. Saran .....	194
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>197</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>202</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi antara manusia hanya terjadi jika terjadi pertukaran simbol, atau disebut sebagai komunikasi. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa komunikasi menjadi kebutuhan dasar manusia dalam menjalin kehidupan bersama, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Salah satu bentuk komunikasi dalam kelompok yang dilakukan manusia ialah dalam sebuah ruang tanpa sekat dan tanpa batas yang disebut sebagai ruang publik,

Konsep ruang publik muncul sekitar abad ke 18, di Eropah sebagai wadah yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu-individu (dalam kehidupan keluarga) dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara (Yuliawan, 2004 : 32 – 35). Dalam ruang publik tersebut, perbedaan-perbedaan dan berbagai kepentingan dan pendapat pribadi bertemu untuk mengatasi kepentingan umum melalui konsensus bersama. Dalam perkembangannya, bentuk ruang publik bisa dalam wujud, organ penyedia informasi seperti surat kabar dan jurnal, termasuk juga di dalamnya lembaga-lembaga diskusi politik, klub-klub politik, klub-



klub sastra, rumah minum, warung kopi, dan lainnya. Tempat tersebut menjadi ajang diskusi sosial politik yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi. Dengan demikian konsep dasar dari ruang publik, hakekatnya merupakan ruang tanpa sekat, dimana publik bisa berinteraksi dengan bebas mengemukakan pendapat sehingga memungkinkan terjadinya transformasi sosial dalam proses yang demokratis.

Jika ditelusuri konsep ruang publik, sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, muncul di Eropah pada abad ke 18, dalam wujud *cafe* di pelataran-pelataran jalan Utama di pusat-pusat kota besar di benua tersebut. Terutama di kota Paris, Perancis. Di tempat tersebut, pemandangan orang menikmati secangkir kopi dengan penganan kecil, sambil membaca Koran, atau berbincang-bincang (diskusi), atau bahkan bermain catur menjadi pemandangan yang lumrah. Dalam konteks ke indonesiaan, kafe ini bisa dilihat dalam wujud warung kopi diberbagai kota besar, lebih spesifik lagi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fenomena warung kopi, sebagai salah satu bentuk ruang publik di Indonesia, pernah mengalami *booming* pada awal krisis ekonomi dan politik pada sekitar tahun 1998 sampai dengan 2001. Warung-warung kopi tersebut, sering disebut sebagai 'kafe tenda' yakni tempat segala macam strata sosial dengan berbagai macam pengalaman membaaur di tempat tersebut.



Namun fenomena ini hanya bertahan kurang lebih 3 – 4 tahun, setelah itu, satu persatu menghilang dari jalan-jalan strategis di kota-kota besar di Indonesia.

Di sisi lain, warung kopi tradisional (ada yang menyebut kedai atau lapo), yang memang telah ada sebelum terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia, tetap eksis dan tidak mengalami gejala penurunan, (misalnya di kota Banda Aceh, Medan, Pontianak, dan Makassar). Gejala warung kopi tradisional ini pernah menjadi reportase salah satu harian nasional terkemuka, yakni harian umum Kompas (Senin, 22 Februari 2010 : 35). Warung kopi ini berbeda dengan warung kopi (*kafe*) sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat kota Jakarta. Jika kita memasuki area tersebut di Jakarta, maka akan nampak gambaran dari jiwa warga kota, yakni keterasingan dan diskriminasi (Kompas, 01 Maret 2010 : 33). Lebih lanjut dikatakan bahwa jika menjelajahi ruang-ruang publik di kota akan terasa sekat-sekat yang akan memerangkap dalam kelas-kelas sosial. Sekat yang mengasingkan diri dengan kemanusiaan kita sendiri.

Di Kota Jakarta khususnya dan kota-kota besar di Indonesia secara umum, *kafe* ini, hanya kalangan tertentu saja yang dapat menikmati tempat tersebut, sementara di warung kopi (ada yang menyebutnya kedai atau lapo), semua kalangan dapat memasuki tempat itu dan terlibat dalam



obrolan yang mereka minati. Kota Medan, Pontianak, dan Makassar disebut oleh “kaum aktifis” sebagai kota “warung Kopi atau kedai kopi.”

Hampir di setiap sudut kota Makassar dapat ditemui warung makan dan juga warung kopi, sehingga kota Makassar juga dikenal sebagai salah satu kota wisata kuliner selain sebagai kota warung kopi. Tiga (3) di antara sekian banyak warung kopi di kota tersebut yang dikenal, baik oleh penduduk setempat atau para “aktifis” dalam kota dan luar kota ialah Warung Kopi Punam, Warung Kopi Zone, dan Warung Kopi Daeng Sija’.

Warung Kopi Phoenam adalah warung kopi yang tertua di antara ketiga warung kopi tersebut, dan bisa dikatakan sebagai warung yang paling banyak dikunjungi dan dikenal dari berbagai warung kopi yang ada di kota tersebut. Di warung kopi ini, berbagai latar belakang sosial dan profesi berkumpul untuk membicarakan berbagai permasalahan yang ada, baik di tingkat kota Makassar, Sulawesi Selatan, maupun issue-isue yang bersifat nasional, bahkan internasional. Di tempat ini dimungkinkan bertemunya antara birokrat dengan para aktifis setempat maupun nasional, dengan masyarakat yang tidak memiliki afiliasi tertentu namun memiliki kepedulian sosial dan politik, maupun kelompok akar rumput.<sup>1</sup> Selain itu dalam Arge (2007 : 556) dikatakan bahwa Warung Kopi Phoenam di Makassar identik dengan kopi susu dan roti kaya yang khas.

---

<sup>1</sup> (Wawancara dengan Qudri, Tokoh NGO Makassar, 29 Maret 2009, di Makassar).



Ke Makassar tanpa ke Phoenam, rasanya belum ke Makassar. Dalam situasi hidup yang tegang, Phoenam adalah sejenis oase, dimana "omong kosong-omong kosong" dapat tersalur bebas. Dalam perkembangannya, obrolan-obrolan bebas sambil menikmati secangkir kopi dan roti bakar tidak hanya dapat di nikmati di warung Kopi Phoenam. Warung kopi yang tersebar di berbagai lokasi di kota makassar, merupakan satu di antaranya yang menjadi pemandangan khas di kota Makassar.

Petrarta Keretji (Mangara dan Syafei, 2008 : 13) menjelaskan bahwa ungkapan obrolan 'warung kopi' lazimnya digunakan untuk mengidentifikasi sebuah diskusi yang tidak mendalam dan dilakukan tanpa direncanakan, sehingga menghasilkan rumusan ataupun kesimpulan yang yang tidak mendalam. Namun di warung kopi (sejenis; Warung Kopi Phoenam) "*banyolan*" dan cerita umum disisipi diskusi serius dan berbagai kerangka solusi terhadap permasalahan dan tantangan masyarakat dan Negara. Bahkan bagi pendengar dan pengamat yang baik, obrolan tersebut dapat memberi arahan dan masukan terhadap apa yang sedang menjadi harapan maupun kecemasan masyarakat.

Pernyataan menunjukkan bahwa perubahan sosial<sup>2</sup> yang terjadi di kota Makassar seakan identik dengan perkembangan warung kopinya.

---

<sup>2</sup> Dimaknai sebagai proses menuju ke hal yang lebih baik, (lih: Fauzi, 2003 : 74).



Dalam kaitannya dengan perubahan sosial (modernisasi), Teori Kritis melihat proses ini sebagai proses berkembang dan menyebarnya rasionalitas manusia Barat ke segenap segi kehidupan dan tingkah laku sosial, yang disebut sebagai rasionalisasi (Hardiman, 2003 : 73 – 78). Pengikut Teori kritis (Adorno – Horkheimer – Marcuse) melukiskan bagaimana proses rasionalisasi masyarakat bermuara ke dalam sebuah tragedi besar . Karena mendewakan rasionalitasnya yang semula dianggap memberi otonomi dan kebebasan, manusia dewasa ini justru terperangkap dalam jaringan birokrasi yang impersonal dan kehilangan makna dan aspirasinya sebagai makhluk bermartabat. Rasionalitas yang semula sangat kritis terhadap mitos-mitos tradisional, pada gilirannya menjadi mitos atau ideologi baru yang total dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya paham-paham politik tertentu. Mereka beranggapan bahwa di dalam proses ini tidak berlaku rasionalitas yang dicita-citakan manusia, yang memberi kebahagiaan dan otonomi. Sebaliknya, dalam selubung rasionalitas, sebuah kekuasaan politis sedang menindas masyarakat, justru terjadi melalui proses rasionalitas tersebut.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, dalam kaca mata teori kritis, perubahan sosial yang terjadi di kota Makassar merupakan bentuk baru dari kuasa (dominasi) kelompok politik tertentu (atau lainnya)



terhadap kelompok lainnya. Jika ditilik dari sudut kesejarahan Republik Indonesia, terutama selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru yang berprinsip pada Trilogi<sup>3</sup> pembangunan, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi acuan utama yang didukung oleh stabilitas keamanan, ditandai dengan dominasi negara di segala sektor yang ditunjang oleh pelaku ekonomi (pengusaha) satu sisi dan sisi lainnya adalah masyarakat kebanyakan sebagai obyek dari pembangunan. Meskipun reformasi telah memasuki usia tahun yang ke 14 (terhitung sejak pemilu yang diselenggarakan oleh Presiden Habibie tahun 1999) namun kondisi tersebut masih terasa kental. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H Hamka dalam promosi doktrinya di Universitas Negeri Makassar, 31 Maret 2010 (Fajar, 01 April 2010 : 12) sebagai berikut:

Tata kelola pemerintahan yang baik harus optimal menganut prinsip *good governance* dalam setiap kebijakan public. Di samping itu, dibutuhkan hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (pelaku ekonomi) selaku pemangku kepentingan... Namun dalam kenyataannya, interaksi ketiganya masih berlangsung timpang.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, mengingat bahwa dewasa ini peran pemerintah tetap di depan dengan berbagai kebijakan dan implementasinya yang didukung oleh pelaku usaha, sementara kebanyakan masyarakat tetap sebagai obyek dari pembangunan.

---

<sup>3</sup> Trilogi pembangunan dipahami sebagai konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, pada zaman orde baru, melalui konsep RePelita (Rencanan Pembangunan Lima Tahun) dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)



Meskipun terkesan yang terjadi adalah *ideal*, yakni melalui mekanisme Pemilu, namun yang tak kasat mata dirasakan terdapat kolaborasi antara pihak pemerintah dengan kelompok-kelompok pengusaha. Atas nama profesionalisme, pengusaha menjadi calon menteri dan bahkan menjadi menteri. Tak terhitung jumlahnya, yang menjadi pengurus partai-partai besar, pemilik media sekali pun yang tentunya berimplikasi terhadap pemberitaan media. Hal ini menjadi indikasi dari suasana hegemoni atas satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang tokoh NGO, Qudri, di makassar (29 Maret 2009) antara lain dikatakan bahwa dalam mendorong demokratisasi yang substantif diperlukan empat pilar demokrasi, yakni pemerintah, pengusaha, masyarakat sipil<sup>4</sup>, dan pers. Namun dalam kenyataannya selama ini, yang menonjol perannya dalam perencanaan implementasi kebijakan publik adalah pihak pemerintah dan pengusaha. Sementara masyarakat sipil dan pers cenderung untuk diabaikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa warung kopi yang selama ini dikonotasikan sebagai tempat “kongkow-kongkow” dan tempat ideal untuk mengkonsumsi “minuman keras”, saat

---

<sup>4</sup> Culla, (2006 : 33 – 34) Konsep masyarakat sipil menentang gagasan hubungan top down negara – masyarakat. Masyarakat sipil adalah sebuah usaha secara sadar untuk membatasi wilayah Negara dan memperluas wilayah non pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebutan “Ornop” berjalan paralel dengan term masyarakat sipil yang dipahami sebagai wilayah atau entitas di luar Negara, yakni suatu masyarakat yang berusaha membangun dan menjaga kemandirian tidak hanya ketika berhadapan dengan Negara tetapi juga dengan sektor bisnis (masyarakat ekonomi).



ini di kota Makassar justru menjadi tempat untuk melakukan diskusi-diskusi publik yang sifatnya terbuka dan demokratis serta berlangsung secara santai. Ada birokrat, anggota legislatif, pengusaha, aktifis, bahkan terkadang gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar (Kompas, Sabtu, 09 oktober 2010) ada di warung kopi tersebut.

Kebiasaan masyarakat bugis – makassar duduk berkumpul sambil menikmati secangkir kopi dan berdiskusi merupakan pemandangan yang lazim kita jumpai di warung kopi kota tersebut. Dijelaskan oleh Qudri<sup>5</sup> bahwa ngobrol-ngobrol di warung kopi ini merupakan jelmaan dalam bentuk lebih lanjut dari adat '**Tudang Sipulung**'. Meskipun kebiasaan tersebut sulit untuk menemukan rujukan keberadaannya secara historis. Namun di beberapa tempat, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), istilah ini digunakan terbatas hanya untuk menunjuk pada pertemuan berbagai pihak untuk membicarakan masalah "waktu yang tepat untuk bercocok tanam". Atau ritual "tau lotang"<sup>6</sup> yang pada waktu tertentu berkumpul di salah satu desa, yakni Amparita. Pada ritual tersebut, masing-masing orang tidak diperkenankan untuk berbicara antara satu dengan yang lainnya, hanya sekedar berkumpul. Berbeda dengan yang terjadi di warung Kopi, mereka yang "tudang sipulung"

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*

<sup>6</sup> (Wawancara dengan penduduk kota Makassar dan sekitarnya, 29 Maret s/d 3 April 2011, di Makassar).



(duduk berkumpul) bertukar pesan antara satu dengan yang lainnya dan membicarakan berbagai persoalan dan solusinya, tujuannya ialah demokrasi yang lebih substantif. Artinya, ada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari diskusi tersebut, dan menjadi agenda bersama peserta diskusi untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Pernyataan Qudri ini mengantar pada pemahaman bahwa budaya berkumpul dan membicarakan berbagai persoalan masyarakat, bukan sesuatu yang baru, tetapi mengakar dan ada pada budaya masyarakat Bugis – Makassar, (meskipun sulit untuk menemukan rujukannya) yang oleh Qudri dikatakan sebagai "tudang sipulung". Namun, pernyataan ini dibantah oleh Andi Mangara,<sup>7</sup> Penulis demokrasi di warung Kopi. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan antara yang terjadi di "tudang sipulung" dengan komunikasi yang terjadi di warung kopi. Dalam "tudang sipulung" ada struktur, sementara di warung kopi tidak ada struktur. Ini terlihat dari meja yang ada di warung kopi yang umumnya bundar atau persegi empat yang sama sisi. Filosofi dari bentuk meja tersebut, mengarah pada makna bahwa tidak ada kepala meja untuk pemimpin. Semua peserta sama posisinya. Dengan demikian proses komunikasi di warung kopi kota Makassar, dalam konteks komunikasi kekinian, dimaknai

---

<sup>7</sup> (Wawancara dengan Andi mangara, di Warung Kopi Zone, 29 Maret 2011, Makassar)



sebagai wadah yang mempertemukan berbagai pihak dan menjadi saluran yang mempertemukan peserta komunikasi.

Hal ini bisa dipahami, mengingat bahwa pengetahuan yang bersangkutan tentang *tudang sipulung* merujuk pada pertemuan birokrat daerah dengan petani untuk membicarakan masalah pertanian di Kabupaten Sidrap. Arti kata "tudang sipulung" sendiri bermakna sebagai duduk berkumpul.<sup>8</sup> Kebiasaan ini tergambar dari kalimat ajakan, "mae tulo bolae to sipulung . . . .", yang berarti "mari datang berkunjung ke rumah, kita berkumpul....." atau kalimat "abbenni ni, to supulung....." yang artinya, "menginaplah, jadi kita berkumpul....." jika memperhatikan kalimat-kalimat ajakan dari masyarakat bugis – makassar maka kata "sipulung" ini bermakna keakraban di antara mereka yang bertegur sapa, tidak ada jarak, saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Kebiasaan lain dari masyarakat bugis – makassar ialah duduk dan berbincang-bincang (*tudang sipulung*) di teras (*lego-lego*) rumah panggung mereka. Pokok pembicaraan yang mengemuka, tidak jauh dari persoalan-persoalan sosial di lingkungan mereka. Tidak heran, jika sebagian besar masyarakat bugis makassar memiliki pandangan yang sama dengan Qudri.

---

<sup>8</sup> (Wawancara dengan Pendudukan Kota Makassar dan sekitarnya, *Op.cit.*)



Namun, fakta yang tak dapat dipungkiri ialah bahwa warung kopi di kota Makassar, bertumbuh pesat dan menjadi saluran komunikasi dari berbagai elemen masyarakat di kota tersebut. Tidak jarang, wartawan bisa mendapatkan berita di tempat tersebut. Atau bahkan yang akan menyelenggarakan konferensi pers lebih memilih warung kopi ketimbang tempat lainnya. Selama ini (32 tahun rezim Orde Baru), berbagai saluran komunikasi hanya dikuasai oleh kelompok elit. Warung kopi, diinisiasi oleh kelompok LSM di kota Makassar menjadi saluran yang terbebas dari kepentingan elit. Di warung kopi ini, berbagai kepentingan disalurkan untuk mendapatkan kesepakatan, dan kemudian berproses menjadi pernyataan umum (opini publik).

Dalam konteks kekinian budaya ***Tudang Sipulung*** pada sebagian masyarakat bugis – makassar dan warung kopi dipahami sebagai dunia sosial masa lalu (***Tudang Sipulung***) yang dikonteks kinikan (dunia sosial masa sekarang) berupa budaya diskusi dalam sebuah warung kopi yang melibatkan berbagai pihak, atas nama demokrasi yang substantif.<sup>9</sup> Hal ini dapat diamati dari kebiasaan kelompok-kelompok sosial politik di kota Makassar, yang menjadikan warung kopi sebagai arena diskusi. Semisal kasus busung lapar yang menimbulkan korban seorang ibu hamil muda beserta anaknya pada tahun 2007<sup>10</sup>, kelompok NGO yang bereaksi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Qudri, *Op. Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



terhadap kasus tersebut menggelar jumpa pers di warung kopi tertentu, dan sebelum diadakan jumpa pers, para aktifis NGO tersebut melakukan diskusi singkat di Warung lainnya. Di saat yang hampir bersamaan dengan digelarnya jumpa pers, ada pertemuan antar mahasiswa di Warung Kopi yang berbeda. Warung kopi ini juga memiliki komunitas yang relatif homogen, yakni kelompok mahasiswa.<sup>11</sup>

Hasilnya, siang harinya, ada reaksi berupa demonstrasi mahasiswa yang prihatin dengan kasus tersebut dan pemberitaan di media radio dan tv pada sore harinya yang memuat pernyataan kelompok aktifis NGO yang di wakili oleh Qudri, dari FIK ORNOP Sulsel yang disandingkan dengan demonstrasi mahasiswa yang prihatin dengan kasus busung lapar di Makassar tersebut.

Sehari berselang dari pemberitaan tersebut, muncul pernyataan Walikota Makassar yang antara lain menyatakan bahwa KTP kota Makassar tidak lagi dijadikan persyaratan untuk mendata dan memberi bantuan kepada keluarga miskin di kota tersebut.

Jika menilik contoh kasus tersebut, dari sudut komunikasi, fenomena ini, dapat dimaknai; bahwa pada saat proses diskusi dalam ruang warung kopi yang menghasilkan suatu pernyataan dari kelompok NGO adalah proses produksi dan distribusi serta konsumsi teks. Sementara pada saat

---

<sup>11</sup> Beberapa warung kopi di kota Makassar memiliki komunitas yang relatif homogen. Misalnya Warkop Dottoro' dengan komunitas mahasiswa, Warkop Daeng Sija dengan komunitas wartawan. Warkop Lasinrang dengan komunitas pengusaha atau *Makelar*.



terjadi peliputan media maka proses yang terjadi adalah proses reproduksi – distribusi – konsumsi teks.

Gambaran situasi tersebut, menghantar pada pemahaman bahwa di kota Makassar, terdapat suatu ruang sosial untuk berlangsungnya suatu proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ruang tersebut adalah warung kopi. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara kasat mata dari gejala tersebut, telah terjadi proses rasionalitas komunikasi<sup>12</sup> dalam warung kopi di kota Makassar. Hal lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kehadiran elit politik atau sosial tertentu dalam proses tersebut, mengindikasikan bahwa warung kopi di kota Makassar dijadikan ruang komunikasi yang rasional antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Indikasi bahwa warung kopi sebagai ruang komunikasi yang rasional, terlihat dari, selain dari kehadiran elit (pemerintah), pengusaha, dan LSM sebagai representasi dari *civil society*.<sup>13</sup> Sehingga menarik untuk mempertanyakan : Bagaimana pola interaksi yang dibangun para aktor diskursif dalam Warung Kopi di kota Makassar? Bagaimana pola interaksi yang terbangun dalam peristiwa diskursif tersebut mengarahkan tindakan-tindakan sosial masyarakat kota Makassar? Dengan Kata lain bahwa penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam, bagaimana proses

---

<sup>12</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Habermas.

<sup>13</sup> Culla, *Loc.cit.*



diskursif yang berlangsung di warung tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik? Deskripsi aktor yang terlibat dalam proses diskursif tersebut? Serta mengkaji lebih mendalam latar belakang historis kemunculan warung kopi sebagai ruang publik alternatif bagi masyarakat kota Makassar dalam menyalurkan berbagai pendapatnya. Sehingga hasil penelitian ini antara lain diharapkan mampu mengidentifikasi motivasi aktor diskursif dalam ruang tersebut. Pola tindakan komunikasi yang ditampilkan para aktor diskursif di warung kopi tersebut? Pemetaan warung kopi di kota Makassar berdasarkan afiliasi peserta diskursif di dalamnya.

**b. Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut bagaimana pola relasi dan interaksi yang terbangun dalam ruang publik atau warung kopi di kota Makassar dalam konteks warung kopi sebagai wadah (ruang publik) komunikasi sosial bagi masyarakat Kota Makassar. Apakah pola relasi komunikasi yang terbangun di warung kopi tersebut didasari oleh niatan memperjuangkan kepentingan publik (masyarakat kota Makassar) atau ada kepentingan lain yang sadar atau tidak disadari berupaya melakukan hegemoni melalui diskusi-diskusi yang dibangun warung kopi tersebut, berupa intervensi terhadap kebijakan publik untuk kepentingan tertentu.



Dengan demikian dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: ***“Bagaimana praktek intervensi kebijakan publik oleh para aktor di warung kopi kota Makassar dalam mendiskusikan kepentingan publik.”***

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka dirumuskan judul penelitian sebagai berikut:

***INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI WARUNG KOPI KOTA MAKASSAR SEBAGAI RUANG PUBLIK.***

Untuk itu tujuan penelitian ini ialah menemukan, memahami dan membuka selubung hal-hal sebagai berikut:

1. Peran warung kopi bagi masyarakat kota dalam aktifitas komunikasi sosial di kota Makassar.
2. Pola-pola partisipasi dan relasi dari para aktor di warung kopi yang berwujud dalam tindakan komunikasi.
3. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses-proses komunikasi sosial dalam warung kopi tersebut.
4. Motivasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses komunikasi sosial dalam warung kopi tersebut.
5. Pemetaan afiliasi warung kopi di kota Makassar berdasarkan aktor komunikasi yang terlibat di dalamnya.
6. Latar yang mendasari perubahan fungsi warung kopi di kota Makassar.



### **c. Penelitian tentang ruang publik**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa konsep ruang publik merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan wadah yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan negara. Dalam ruang publik tersebut, perbedaan-perbedaan dan berbagai kepentingan dan pendapat pribadi bertemu untuk mengatasi kepentingan umum melalui konsensus bersama. Bentuk ruang publik bisa dalam wujud, organ penyedia informasi seperti surat kabar dan jurnal, termasuk juga di dalamnya lembaga-lembaga diskusi politik, klub-klub politik, klub-klub sastra, rumah minum, warung kopi, dan lainnya. Tempat tersebut menjadi penting karena menjadi ajang diskusi sosial politik yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji tentang ruang publik. Dalam penelitian ini, lokus atau situsnya adalah Warung Kopi Phoenam sebagai ruang publik, sementara yang dikaji secara mendalam ialah proses diskursus yang terjadi dalam ruang tersebut guna menemukan aktifitas-aktifitas diskusi yang mengarah ke rasionalitas komunikasi atau penguatan dominasi (hegemoni) oleh kelompok-



kelompok tertentu. Sementara penelitian tentang ruang publik yang dilakukan oleh Sarwiti Sarwo Prasajo yang berjudul *"Penggunaan Ruang Publik untuk Pemecahan Masalah Sosial di Pedesaan: Studi Kasus Gerakan Sosial Taman Nasional merbabu oleh SPPQT di Salatiga, Jateng"* (2007) dengan lokus pada Balai Desa menemukan bahwa (1) Kesempatan politik berupa perubahan politik otoriter menuju populis memberi peluang munculnya Ornop sebagai organisasi gerakan sosial dalam ruang publik sebagai arena pengambilan keputusan. (2) Forum Rembug sebagai ruang publik gagal sebagai saluran resolusi konflik. (3) Ruang Publik dimanfaatkan oleh berbagai aktor dengan beragam kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adri Firmansyah Ponse dengan judul *"Upaya Penciptaan Ruang Publik dalam Bentuk Parodi Politik di Telelvisi: Studi Program Democracy di metro TV"* (2006) menemukan bahwa penggunaan media televisi sebagai ruang publik melalui salah satu programnya, yakni Democrazy justru diintervensi pemilik modal televisi yang berdampak pada ranah media yang seharusnya netral. Yang menarik ialah penelitian yang dilakukan oleh Eni Maryani dengan judul *"Resistensi komunitas melalui media Alternatif: Tinjauan Teori Kritis terhadap Radio 'Angkringan' sebagai Media Alternatif di Desa*



*Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab Bantul, DIY*" (2007) , menemukan bahwa:

1. Desa Timbulharjo berhasil melahirkan intelektual organik yang mampu melakukan perubahan dalam komunitasnya dan memperluas kesadaran kritis yang dimiliki.
2. Melalui Radio Komunitas, mereka berhasil membangun ruang Publik mereka yang menyuarakan kepentingan mereka.
3. Proses produksi dan konsumsi teks radio angkringan memperlihatkan kemampuan kemampuan komunitas melakukan resistensi, Namun terjadi juga proses negosiasi dengan budaya Jawa dan kebijakan yang ada.
4. Kelangsungan Angkringan sebagai media alternatif terlepas dari kuasa kelompok dominan, bukan tanpa kendala.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada lokus penelitian, Penelitian ini diharapkan dapat menemukan data yang mendukung teori rasionalitas komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, melalui interaksi partisipan diskursif di Warung Kopi di kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, perbandingan dua penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya terlihat dalam tabel 1 pada halaman berikut.



#### **d. Signifikansi Penelitian**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa warung kopi di kota Makassar pada awalnya dihubungkan dengan tempat “kongkow-kongkow” bahkan dikonotasikan sebagai suatu tempat yang ideal bagi kaum pria untuk mengonsumsi minuman keras. Namun bersamaan dengan perkembangan politik di Indonesia, ternyata warung kopi tersebut berubah fungsi menjadi tempat di mana komunikasi sosial berlangsung; diskusi-diskusi publik tentang kebijakan publik, masalah-masalah politik, sosial dan budaya, baik lokal, nasional maupun internasional menjadi bahan perbincangan dalam komunitas warung kopi tersebut.

Jika mengamati secara sekilas, maka akan ditemukan bahwa siapa pun yang berminat dalam wacana yang sedang diperdebatkan dapat terlibat dalam proses diskusi tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa beberapa di antara mereka adalah pelanggan tetap dari warung kopi tersebut. Misalnya saja tokoh Ornop setempat atau wartawan lokal, bahkan anggota legislatif ataupun aparat penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga menarik untuk mempertanyakan eksistensi mereka dalam proses diskusi di warung kopi tersebut. Apa motivasi mereka? Siapa yang mereka representasikan?



Dalam tataran praktis studi ini diharapkan mampu mengungkapkan, memahami, dan menjelaskan peran warung kopi di kota Makassar, motivasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses diskusi, dan menemukan konstruksi ruang publik yang ideal sebagai ruang konsensus untuk mewujudkan *good governance*, yang mengakar pada budaya setempat. Dalam tataran teoritis / akademis, diharapkan studi ini mampu menemukan bahwa pertarungan ideologi di dalam ruang warung kopi tersebut, sarat dengan kepentingan di antara berbagai pihak, konsensus hanya dapat terjadi jika di dasarkan atas prinsip rasionalitas komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas.



**Tabel 1**  
**Perbandingan Penelitian Ini dengan 2 penelitian terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Paradigma Penelitian	Pendekatan Penelitian	Lokus Penelitian	Temuan
Sarwiti Sarwo Prasojo (Disertasi, 2007)	Penggunaan Ruang Publik Pemecahan Masalah Sosial di Pedesaan (Studi Kasus Gerakan Sosial Taman Nasional Merbabu oleh SPPQT di Salatiga Jateng)	Konstruktifis - kritis dengan menggunakan indikator ruang publik Habermas.	Studi dengan kasus tipe representatif	Balai Desa	1. Kesempatan politik berupa perubahan politik otoriter menuju populis memberi peluang munculnya Ornop sebagai organisasi gerakan sosial dalam ruang publik sebagai arena pengambilan keputusan. 2. Forum Rembug sebagai ruang publik gagal sebagai saluran resolusi konflik. 3. Ruang Publik dimanfaatkan oleh berbagai aktor dengan beragam kepentingan.
Eni Maryani (Disertasi, 2007)	Resistensi Komunitas melalui Media Alternatif; Tinjauan teori Kritis terhadap Radio Komunitas "Angkringan" sebagai media alternatif di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul, DIY.	Kritis dengan pendekatan teori Habermas tentang Tindakan Komunikasi	Critical Discourse Analysis, pada tiga tingkatan analisis, yakni mikro, meso, dan makro.	Radio Komunitas, Angkringan	1. Desa Timbulharjo berhasil melahirkan intelektual organik yang mampu melakukan perubahan dalam komunitasnya dan memperluas kesadaran kritis yang dimiliki. 2. Melalui Radio Komunitas, mereka berhasil membangun ruang Publio mereka yang menyuarakan kepentingan mereka. 3. Proses produksi dan konsumsi teks radio angkringan memperlihatkan kemampuan komunitas melakukan resistensi, Namur terjadi juga proses negosiasi dengan budaya Jawa dan kebijakan yang ada. 4. Kelangsungan Angkringan sebagai media alternatif terlepas dari kuasa kelompok dominan, bukan tanpa kendala.
Adri Firmansyah Pansen (Tesis, 2006)	Upaya Penciptaan Ruang Publik dalam Bentuk Parodi Politik di Televisi (Studi Program Demokracy di Metro TV)	Critical political economy	Studi kasus	Televisi ; Metro TV	Terjadi intervensi pemilik modal televisi yang berdampak pada ranah media yang seharusnya netral.
Mirza Ronda (Disertasi)	Komunikasi Sosial di Warung Kopi, di kota Makassar	Kritis dengan menggunakan Teori Habermas tentang Tindakan Komunikasi.	Etnometodologi	Warung Kopi Di kota Makassar.	Terjadi 2 pola relasi komunikasi, yakni komunikasi yg terbangun secara genuine melalui Interaksi warkop yg tidak teragendakan. Komunikasi yg terdistorsi secara sistematis oleh kelompok kepentingan ttt, melalui interaksi warkop yg teragendakan di berbagai warkop di kota Makassar.



## **BAB II** **KERANGKA TEORI**

### **a. Paradigma Kritis**

Komunikasi sebagai suatu kajian dalam ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu yang relatif masih muda usia. Dalam sejarah perkembangannya ilmu komunikasi banyak dipengaruhi oleh ilmuwan dari berbagai latar belakang keilmuan. Tidak hanya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi, politik, psikologi, tapi juga dipengaruhi oleh ilmuwan dari rumpun yang lain (telekomunikasi). Sehingga tidak mengherankan jika dalam perkembangannya dewasa, jika berada dalam satu ruang yang berisikan sepuluh (10) orang ilmuwan komunikasi, maka masing-masingnya akan mengeluarkan definisinya masing-masing.

Fiske (2006) mengemukakan dua mazhab utama dalam studi komunikasi. Pertama ialah mazhab "*proses*" yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Dijelaskan oleh Carey sebagai tindakan komunikasi yang mengedepankan sistem transmisi langsung, satu arah, dari atas ke bawah, dan secara teoritis menganggap khalayak pasif. Ditambahkan oleh Fiske bahwa model ini tertarik pada efisiensi dan akurasi, melihat komunikasi sebagai sebagai sebuah proses dimana seseorang mempengaruhi perilaku atau sikap orang lain. Jika efek tersebut berbeda atau lebih kecil maka dikatakan telah terjadi



kegagalan komunikasi dan melihat ketahapan-tahapan proses komunikasi tersebut untuk mencari penyebab kegagalan tersebut.

Kedua, ialah mazhab semiotika, yang melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Ia berkenaan dengan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna; yakni, ia berkenaan dengan peran teks dalam kebudayaan kita. Ia menggunakan istilah-istilah seperti pertandaan (*signification*), dan tidak memandang kesalahpahaman sebagai bukti yang penting dari kegagalan komunikasi—hal itu mungkin akibat dari perbedaan budaya antara pengirim dan penerima. Bagi mazhab ini, studi komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan. Metode studinya yang utama adalah semiotika (ilmu tentang tanda dan makna). Mazhab proses cenderung menggunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan perhatian pada tindakan komunikasi. Sedangkan mazhab semiotika cenderung mempergunakan linguistik dan subjek seni, dan cenderung memusatkan perhatian pada karya (hasil) komunikasi.

Dalam Miller (2005) mazhab tersebut dijelaskan dengan konsep perspektif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perspektif merupakan sebuah cara pandang atau penglihatan tentang suatu fenomena tertentu. Dalam konteks komunikasi, bagaimana proses-proses komunikasi itu dikaji



atau dipelajari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada tiga (3) titik temu utama dalam memandang fenomena komunikasi, yakni komunikasi sebagai suatu proses, komunikasi adalah transaksional, dan komunikasi adalah simbolis.

Ketika melihat komunikasi sebagai sebuah proses, maka interaksi-interaksi yang sederhana sekalipun dipengaruhi oleh pola-pola kompleks masa lalu yang memiliki implikasi-implikasi penting untuk masa depan. Perspektif ini memandang komunikasi berlangsung secara linier, komunikasi bergerak dari sebuah sumber menuju sebuah penerima. Perspektif ini direpresentasikan dalam model komunikasi sumber-pesan-saluran-penerima (source – message – channel – receiver / SMCR). Model ini, fokus perhatiannya pada proses komunikasi sebagai sebuah kegiatan pengiriman langsung melalui sebuah saluran tunggal. Atau model komunikasi klasik Lasswell (1964) mengajukan sejumlah pertanyaan linier: siapa? Mengatakan apa? Kepada siapa? Melalui saluran apa? Dengan pengaruh apa?

Perspektif yang kedua, yakni perspektif transaksional. Konsep ini mesti dibedakan dengan konsep interaksional. Dalam perspektif interaksi, memandang komunikasi berbeda dengan model jarum hipodermis atau teori peluru (sebagaimana model proses –pen), dimana umpan balik dari penerima dianggap menjadi penting. Dalam sebuah



model interaksi, selain pesan - sumbernya juga reaksi penerimanya menjadi penting. Pandangan interaksional merupakan kelanjutan dari perspektif sebelumnya dimana komunikasi dianggap tidak secara ketat merupakan sebuah proses satu arah dengan efek-efek langsung dan linier. Tetapi, model ini masih relatif menyederhanakan komunikasi dalam isolasi sumber – penerimanya dengan pertimbangan pengaruh terbatas di antara keduanya. Berbeda dengan perspektif transaksional, agak mirip dengan pandangan interaksional, menyertakan peran penting umpan balik. Namun, pandangan transaksional bergerak lebih jauh dalam melihat komunikasi sebagai sebuah proses dimana ada pengaruh saling menguntungkan dan konstan di antara para partisipan komunikasi. Seperti yang kemukakan oleh Burgoon and Ruffner (dalam Miller, 2005) sebagai berikut:

Orang-orang secara simultan bertindak sebagai sumber dan penerima dalam banyak situasi komunikasi. Seseorang memberikan umpan balik, berbicara, merespon, bertindak, dan bereaksi terus menerus melalui sebuah peristiwa komunikasi. Masing-masing orang secara konstan berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi. Semua hal ini dapat mengubah elemen-elemen lain dalam prosesnya dan menciptakan suatu peristiwa komunikasi yang sepenuhnya berbeda. Ini yang dimaksudkan dengan transaksi.

Ditambahkan oleh Miller (2005) pandangan komunikasi sebagai transaksional menekankan arti penting konteks dalam suatu proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, tidak hanya para partisipan



secara konstan mempengaruhi satu sama lain, mereka juga dipengaruhi oleh konteks dimana mereka berinteraksi. Misalnya, sebuah komentar yang dibuat dalam sebuah organisasi dapat menggunakan makna sangat berbeda bergantung pada apakah komentar itu didengar dalam suatu pertemuan penilaian kinerja formal atau dalam percakapan sepintas lalu di kantin. Sebuah tayangan televisi yang menggambarkan aksi-aksi kekerasan dilihat sangat berbeda-beda oleh anak-anak itu sendiri berbanding anak-anak dalam kumpulan orang tua yang mendiskusikan muatan program. Dengan perspektif transaksional tentang komunikasi kita sampai pada pemahaman tentang kompleksitas dalam suatu proses komunikasi.

Perspektif ketiga ialah memandang komunikasi adalah simbolis, maksudnya bahwa komunikasi memerlukan tanda-tanda dan simbol-simbol yang memiliki hubungan-hubungan dengan berbagai referen yang bersifat arbitrer dalam sejumlah tingkatannya. Simbol-simbol ini dapat bersifat verbal (yakni, penggunaan bahasa) atau nonverbal. Simbol-simbol nonverbal dapat dilihat dalam banyak kegiatan komunikasi dan dalam banyak konteks. Sejumlah perilaku nonverbal aktualnya lebih berperan sebagai sebuah tanda dibanding sebuah simbol. Misalnya, Ekman and Freisen (1975) mendapati bahwa ekspresi-ekspresi wajah dilihat meluas sebagai indikator-indikator emosi yang dikenali diseluruh



batas budaya. Komunikasi nonverbal lain jelas-jelas menggunakan bentuk arbitrer daripada sebuah simbol. Misalnya, pertimbangkan sejumlah contoh komunikasi menurut konteks organisasi. Ketika anda berpakaian dalam sebuah setelan untuk suatu wawancara kerja, setelan tersebut dapat menyimbolkan banyak hal—rasa hormat anda pada perusahaan, keinginan anda untuk patuh, atau rasa organisasi dan kepantasan anda. Ketika seorang manajer memilih untuk mengirim sebuah pesan melalui sebuah memorandum kertas bukannya lewat telepon, email, atau saluran-saluran inter personal, pilihan itu dapat menyimbolkan banyak hal—formalitas pesan atau barangkali keharusan untuk mengarsipkan pesan untuk acuan masa depan. Jadi, pesan-pesan nonverbal yang kita kirim dan terima dicirikan oleh hakekat simbolisnya dan karena kemungkinan-kemungkinan perbedaan antara simbol dan referen, ada kecenderungan tidak terjadi komunikasi yang "sempurna". Sejumlah ilmuwan beranggapan bahwa simbol-simbol tidak memiliki korelasi yang stabil dengan dunia dan bahwa makna agaknya merupakan sebuah fungsi hubungan-hubungan kekuasaan, ideologi, konteks situasional, atau sejarah (misalnya, Bochner, 1985; Deetz, 1973; Lannaman, 1991; Stewart, 1986). Sebaliknya, pada ilmuwan lainnya, (lihat, utamanya, Ellis, 1995) berargumentasi bahwa meskipun simbol-simbol tidak memiliki makna tunggal, tepat, simbol-simbol dapat dilihat sebagai



sesuatu yang memiliki kaitan-kaitan bermakna dan signifikan dengan referen-referen. Namun, perdebatan tentang stabilitas makna tidak membedakan mereka dalam memandang komunikasi merupakan sebuah proses simbolis.

Berdasarkan uraian tersebut, Miller (2005) dalam memandang pengelompokan tiga (3) perspektif utama dalam memandang komunikasi, dihubungkan dengan perspektifnya dalam mengelompokkan ilmu pengetahuan, maka dapat dikatakan bahwa pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses dan interaksional dikelompokkan dalam perspektif positifis dan post – positifis. Sementara yang memandang komunikasi tidak terlepas dari konteks dimana komunikasi itu berlangsung, selain juga sumber – pesan – penerima, dikelompokkan dalam perspektif interpretif. Sementara komunikasi adalah simbolis dikelompokkan dalam perspektif kritis.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, peneliti memahami realitas yang diamati, yakni proses-proses diskursif yang terjadi dalam ruang publik (Warung Kopi di kota Makassar) kemungkinan merupakan realitas 'semu' (virtual reality) yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi – politik (Historical realism), yakni eforia kebebasan yang merupakan implikasi dari reformasi 1999, yang secara kultural bersinggungan dengan budaya setempat yang



disebut sebagai '*Tudang Sipulung*'. Hal ini berimplikasi pada upaya atau teknik prosedural peneliti memahami realitas, yakni hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti dijumpai nilai-nilai bahwa yang diteliti merupakan bagian tak terpisahkan dari peneliti. Maksudnya peneliti merupakan aktor yang terlibat dalam subjek yang diteliti. Sehingga dari sudut metodologis, guna melakukan analisis komprehensif, peneliti harus mampu menempatkan diri sebagai partisipan. Adapun kualitas penelitian, dimungkinkan, karena konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, merupakan hal yang melekat bagi peneliti. Dengan demikian implikasi aksiologis penelitian ini, tegas dinyatakan, untuk mendorong terjadinya perubahan pola relasi komunikasi ke arah yang *genuine*<sup>14</sup>.

Dalam Miller (2005), dikatakan bahwa para pembentuk teori dalam tradisi teori kritis menginginkan bahwa ilmuwan harus bertanggung jawab, dengan tidak menyederhanakan gambaran tentang dunia sosial (berpikir bahwa mereka akan melihat suatu Representasi/deskripsi sebagai suatu langkah awal yang sangat penting dalam proses teoritis) tetapi hendaknya ilmuwan dapat bekerja sebagai agen yang aktif dalam membentuk kembali dan menciptakan perubahan yang radikal dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa teori kritis

---

<sup>14</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas.



dipengaruhi oleh idealisme Jerman, tradisi yang dikembangkan oleh Imanuel Kant. Menurutnya manusia berada dalam proses interpretif yang merupakan pusat pembentukan pengertian di dalam dunia social.

Tokoh-tokoh lain yang berpengaruh dalam tradisi ini ialah **Georg Wilhelm** (1770-1831) , yang fokus pada dua hubungan yaitu hubungan dialektikal antara pengalaman subjektif individu dan dunia luar serta ketegangan dasar dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, **Hegel** yang memandang manusia hidup dan menyikapi karakteristik kehidupan dari pengaruh yang konstan. Hal ini terjadi ketika proses kesadaran manusia dengan objek yang berada di dunia luar bertemu. Hegel mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan dunia luar telah disituasikan seiring dengan perkembangan sejarah dan digantungkan kepada zaman dimana manusia tersebut hidup. Tak kalah pentingnya ialah **Karl Marx** (1818-1883) yang banyak berkontribusi ajarannya terhadap teori kritis. Terutama ajaran “**early**” **Marx (Marx muda)** banyak dipengaruhi oleh ajaran Hegel tentang ketegangan antara pengalaman subjektif didalam diri dan dunia luar dan juga oleh sejarah alami dari ketegangan tersebut. Marx percaya bahwa dunia luar adalah salah satu tempat yang telah diciptakan manusia dan dibuat seolah objektif dan dunia luar bertransformasikan menjadi individual yang subjektif. Proses Objektifikasi



ini menurut Marx, di jadikan sumber fundamental dari Aliniasi (keterasingan).

Lebih lanjut (Miller, 2005) dijelaskan bahwa “**Later**” Marx (Marx Tua) menspesifikasikan alienasi kedalam dialektika historis dengan mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme dan industrialisasi. Marx berbalik, berpindah dari posisi idealis yang memfokuskan kepada peran manusia dalam penciptaan dunia sosial, dengan penekanan pada dialektika serta aliniasi, ke pada interpretasi dunia sosial yang lebih realistis dan materialis. Selain itu, Konsep Marx (tua dan muda) mengembangkan suatu pandangan tentang sebuah hubungan diantara individu dan ruang lingkup sosialnya. Dalam konsep Marx Tua, hubungan yang dijalin adalah nyata dan dalam bentuk material. Dimana, kondisi ekonomi dalam substruktur mempengaruhi factor-faktor superstruktur, dan kedua elemen substruktur dan superstruktur menyebabkan Aliniasi.

Perkembangan lebih lanjut dari tradisi ini ditandai dengan lahirnya institusi penelitian sosial yang didirikan di Frankfurt Jerman pada 1923. Dalam institusi berkumpul antara lain Max Horkheimer, Herbert M, Walter Benjamin. Mereka selanjutnya dikenal sebagai Frankfurt School dan komitmen intelektual mereka dikenal sebagai teori kritis. Frankfurt School tumbuh dan berkembang atas ideologi Marxist yang berkaitan dengan tekanannya dalam kritik. Artinya, teori kritis dari Frankfurt School



berangkat dari beberapa pemikiran Ortodox Marxist pada periode tersebut. Yang paling membedakan mereka dengan marxist ialah, para ahli *Frakfurt School* tidak menganut teori Materialist yang menjadi karakter Marx pada '*Later Year*' nya. Dijelaskan oleh Rogers (1997 : 108) bahwa tradisi kritik yang dikenal juga dengan mazhab Frankfurt atau *Institute for Social Research*, merupakan perpaduan antara pemikiran Marxist dan Freudian. Lebih lanjut dikatakan bahwa Habermas sebagai generasi kedua dari tradisi ini mengemukakan suatu *grand* teori dalam *level* abstraksi yang tinggi dengan menolak positifisme dengan penekanan pada materialisme. Ia menginginkan komunikasi yang bersifat *emansipatory* yang bebas dari eksploitasi atau penekanan. Secara sederhana sejarah pemikiran dari tradisi ini di tampilkan dalam gambar 1.

Teori Kritis dalam pandangan Horkheimer (Hardiman, 1990 : 57 – 58) memiliki kekuatan pada metode dialektika yang mencari kontradiksi-kontradiksi di dalam kenyataan kongkrit. Dengan demikian, maka teori kritis memiliki empat (4) karakter. Pertama, teori kritis bersifat historis. Artinya teori kritis dikembangkan berdasarkan situasi masyarakat yang kongkrit dan berpijak di atasnya. Kedua, karena bersifat historis tadi, maka teori kritis harus kritis terhadap dirinya sendiri. Maksudnya teori kritis menyadari resiko bahwa setiap teori sangat mungkin jatuh ke dalam salah satu bentuk ideologi. Jika teori tradisional menggantungkan



kesahiannya pada verifikasi empiris, teori kritis mempertahankan kesahihannya melalui evaluasi, kritik dan refleksi terhadap dirinya sendiri. Ketiga, sebagai akibat dari metode dialektis, teori kritis memiliki kecurigaan kritis terhadap masyarakat aktual. Kecurigaan kritis ini dimaksudkan untuk menelanjangi kedok-kedok ideologis yang digunakan untuk menutup-nutupi manipulasi, ketimpangan dan kontradiksi-kontradiksi di dalam masyarakat. Keempat, teori kritis merupakan teori dengan maksud *praxis*, yakni teori yang tidak memisahkan dirinya dari *praxis*. Maksudnya, teori kritis dibangun untuk mendorong transformasi masyarakat dan transformasi masyarakat itu hanya dilakukan dalam *praxis*. Jadi teori kritis merupakan komitmen praktis sang pemikir kritis di dalam sejarahnya. Dengan cara ini, teori kritis menjadi tidak netral.

Selanjutnya, Miller (2005) menjelaskan bahwa ada empat (4) konsep dasar yang mewarnai tradisi kritis, yakni totalitas, kesadaran, alienasi, dan kritik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

(1) **Totalitas;** mengandung makna bahwa setiap masyarakat yang mengerti harus berpegang di dalam keseluruhan dunia objektif dan subjektif yang mencirikan masa atau zaman. Kepercayaan dan komitmen total adalah segalanya, tanpa batas. Pemahaman tentang totalitas ini harus mendahului sebuah pemahaman tentang elemennya



(elemen totalitas). Karena hal yang paling mendominasi bagian dalam semua bentuk cakupan adalah akal.

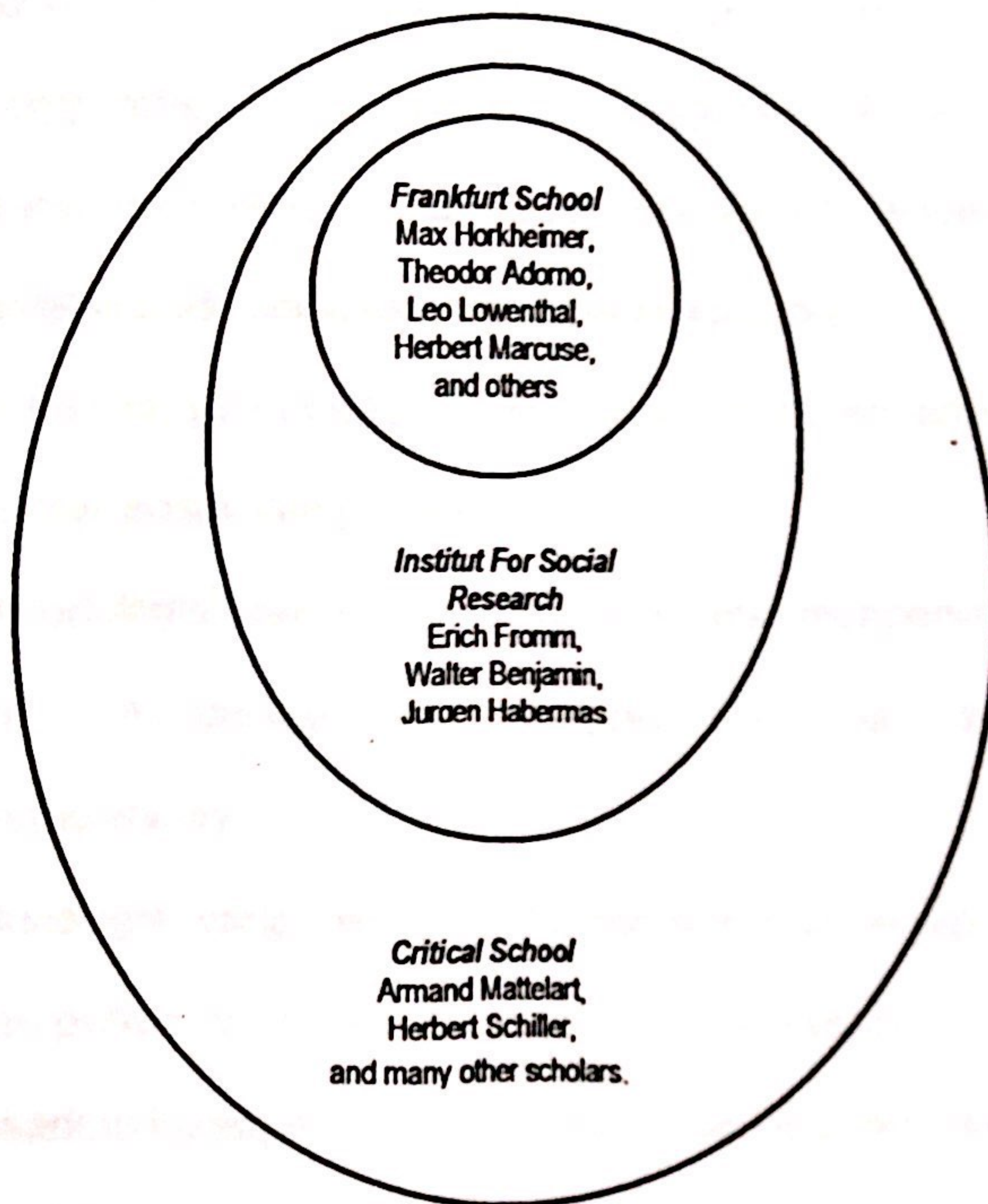
(2) **Kesadaran;** Tekanan yang pada akhirnya menciptakan dan mempertahankan dunia sosial. Kesadaran dibentuk dari dalam diri tetapi dipengaruhi oleh bentuk-bentuk lain yang diterima dari proses objektifikasi dan dialektik antara dunia subjektif dan objektif.

(3) **Alienation;** Kondisi dimana, dalam totalitas tertentu, batasan kognisi dialirkan di antara kesadaran manusia dan keobjektifikasian dunia sosial. Oleh karenanya manusia melihat apa-apa yang mereka ciptakan dari kesadaran mereka masing-masing dalam bentuk kekerasan, dominasi, dan realitas eksternal. Batasan ini adalah batasan alienasi, yang memisahkan manusia dari diri mereka yang sebenarnya dan menghindari asupan-asupan dari potensi-potensi mereka sebagai manusia.

(4) **Kritik;** Dalam kritik mereka tentang masyarakat maju, para ahli teori kritis ini memfokuskan kepada bentuk dan sumber-sumber dari Alienasi, yang mereka anggap sebagai penghalang kemungkinan-kemungkinan dalam pemenuhan bagi manusia.



**Gambar 1: Tokoh Utama dari Frankfurt School, Institute for Social Research, Critical School<sup>15</sup>**



Lebih lanjut dijelaskan Miller (2005) bahwa tradisi ini dapat dibedakan dengan tradisi-tradisi lainnya berdasarkan penjelasan methateori, yakni komitmen ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologi. Hal ini dijelaskan oleh Hidayat (2002) bahwa empat (4) dimensi dalam methateori tersebut, ialah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Everett M. Rogers, *A History of Communication Study: A Biographical Approach*, The Free Press, New York, 1997



1. Epistimologi, yang antara lain menyangkut asumsi mengenai hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses untuk memperoleh pengetahuan mengenai obyek. Semuanya menyangku teori pengetahuan (*theory of knowledge*) yang melekat pada perspektif teori dan metodologi.
2. Ontologis, yang berkaitan dengan asumsi mengenai obyek atau realitas sosial yang diteliti.
3. Metodologis, yang berisi asumsi-asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu obyek pengetahuan.
4. Aksiologis, yang berkaitan dengan posisi *value jugments*, etika, dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian.

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, disimpulkan (Hidayat, 2002) bahwa dari dimensi ontologis, paradigma kritis memahami realitas yang teramati merupakan realitas 'semu' (virtual reality) yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi – politik (*Historical realism*). Dimensi epistimologi, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated finding*. Dimensi metodologi ditandai oleh dua hal, yakni dalam paradigma kritis mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multy-level



analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktifis/partisipan dalam proses transformasi sosial, dan kriteria kualitas penelitian dilihat dari sejauhmana peneliti memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam dimensi aksiologis, ditandai dengan tiga hal, yakni nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian, peneliti menempatkan diri sebagai transformatif intelektual, advokat dan aktifis, dan yang terakhir ialah tujuan penelitian adalah kritik sosial, transformasi, emansipasi dan *social empowerment*.

Dalam McCarthy (2006: 165 – 166) dijelaskan oleh Habermas bahwa teori sosial kritis bersifat empiris tanpa direduksi menjadi ilmu empiris analitis; ia bersifat filosofis namun dalam pengertian kritik dan bukan dalam pengertian filsafat pada awalnya; terakhir, ia bersifat historis tanpa harus menjadi historis, dan bersifat praktis namun tidak dalam pengertian penguasaan potensi teknologis melainkan dalam pengertian berorientasi pada pencerahan dan emansipasi. Lebih lanjut dijelaskan Hidayat (2002 : 3) paradigma kritis mendefenisikan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkapkan "*the real struktur*" dibalik ilusi, *false needs*, yang dinampakkan dunia materi, dengan tujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia. Dijelaskan oleh



Kincheloe dan McLaren (Denzin dan Lincoln, 2009 : 180), secara metodologis, seorang peneliti kritis pada saat mendapatkan data empiris yang diambil dari suatu penelitian, tidak dapat menerima begitu saja sebagai fakta-fakta yang tak dapat disangkal. Data tersebut, mewakili asumsi-asumsi tersembunyi –asumsi-asumsi yang harus digali dan diungkapkan oleh peneliti kritis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pengetahuan yang dihasilkan dari dunia harus diinterpretasikan dan menjadi bagian dari dunia tersebut. Apa yang disebut informasi selalu melibatkan tindak penilaian manusia. Dalam perspektif kritis tindak penilaian ini merupakan sebuah tindakan interpretif. Interpretasi teori, dalam pandangan kritis, mencakup pemahaman tentang hubungan antara yang partikuler dengan yang menyeluruh dan antara subjek dengan obyek analisis.

Secara lengkap dijelaskan oleh Agger (2007 : 7 - 10), bahwa sebagai sebuah teori sosial, teori ini memiliki 7 ciri (asumsi) yang membedakannya dengan tradisi lainnya, yakni (1) Pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis “di luar sana” namun dia adalah konstruksi aktif oleh ilmuwan dan teori yang membuat asumsi tertentu tentang dunia yang mereka pelajari, tidak sepenuhnya bebas nilai. Teori sosial kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historitasnya; (2) Membedakan masa lalu dan masa kini yang secara umum ditandai oleh



dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Teori ini melihat relasi antara masa lalu – kini – depan dengan mengatakan bahwa potensi masa depan yang lebih baik telah ada pada masa lalu dan kini. Sehingga teori ini mendorong kemungkinan kemajuan melalui aksi sosial dan politik yang intensif; (3) Dominasi bersifat struktural, sehingga teori ini mengungkap struktur ini untuk membantu masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami; (4) Struktur dominasi tersebut, direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh ideologi (Marx), reifikasi (Lukacs), Hegemoni (Gramsci), pemikiran satu dimensi (Marcuse), dan metafisika keberadaan (Derrida). Sehingga dalam hal ini, teori kritis hendak mematahkan kesadaran palsu tersebut dengan meyakini adanya kuasa manusia, baik secara pribadi maupun kolektif untuk mengubah masyarakat; (5) Perubahan sosial di mulai dari rumah, pada kehidupan sehari-hari manusia. Sehingga teori ini menghindari determinisme dan mendukung voluntarisme; (6) Menggambarkan hubungan struktur dengan manusia secara dialektis. Pengetahuan tentang struktur dapat membantu masyarakat mengubah kondisi sosialnya, namun menolak determinisme ekonomi; dan (7) Karena itu, teori ini berkeyakinan bahwa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas kebebasan mereka sendiri serta mencegah mereka agar tidak menindas atas sesamanya atas nama kebebasan jangka panjang.



Pengikut teori ini menolak pragmatisme revolusioner. Kebebasan tidak dapat diraih melalui pengorbanan "pragmatis" kebebasan dan kehidupan.

Hal tersebut disederhana oleh Littlejohn dan Foss (2009 : 68 – 69) dengan menyatakan bahwa tradisi ini memiliki tiga keistimewaan pokok, yakni pertama mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan –atau ideologi- yang mendominasi masyarakat. Kedua ahli teori kritik umumnya tertarik untuk mengungkap kondisi-kondisi sosial yang menindas untuk mempromosikan emansipasi atau kebebasan masyarakat dengan memahami penindasan itu dan menghapus ilusi-ilusi ideologi. Ketiga, yakni menciptakan kesadaran untuk mengabungkan teori dengan tindakan. Artinya, penelitian bertujuan untuk membuka jalan bagi partisipasi kelompok-kelompok marginal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dalam kajian komunikasi, para ahli tradisi kritik umumnya tertarik dengan bagaimana suatu pesan memperkuat dominasi dalam masyarakat, namun akibat keluasan cakupannya, agak sulit untuk mengelompokkan dan menempatkan tradisi ini ke dalam keseluruhan teori komunikasi. Cabang-cabang pokok dari tradisi ini ialah *marxisme*, *the frankfurt School of Critical Theory*, post-modernisme, kajian budaya, post-strukturalisme, post-kolonialisme, dan kajian feminis. Para ahli dalam tradisi kritik ini, tertarik pada tindakan sosial, namun mereka juga fokus pada wacana dan teks-teks yang mempromosikan ideologi-ideologi



tertentu, membentuk dan mempertahankan dominasi, dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian dalam teori ini, komunikasi tak terpisah dari faktor lain yang terdapat pada keseluruhan sistem yang mendominasi.

#### **b. Komunikasi Sosial dan Ruang Publik**

Menurut Fidler (2007 : 1 – 6), agak sulit untuk mendefinisikan pengertian komunikasi Sosial. sebab mengamati dan mengkonstruksikan komunikasi sosial merupakan tugas yang sulit, mengingat bahwa fenomena komunikasi ini terjadi setiap saat dan selalu berubah-ubah. Namun dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial merujuk pada bagaimana cara seseorang menyampaikan informasi pada orang lainnya, cara mereka berbagi info, atau bagaimana informasi tersebut diterima dan diinterpretasikan. Dijelaskan bahwa presentasi diri kita di depan umum sebagai salah satu wujud komunikasi sosial, menunjukkan motif sosial kita dari pada kemampuan kita dalam berinteraksi secara simbolik, dan menurutnya, bahasa memegang peranan terpenting dalam menentukan simbol dalam berkomunikasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa satu poin penting lainnya ialah sebuah komunikasi interpersonal sebagai bagian dari komunikasi sosial, selalu terikat atau termotivasi pada sebuah tujuan yang berujung pada tujuan



lain, misal; seorang anak bertujuan harus dapat berkomunikasi ke ayahnya hari ini masalah pembayaran uang kuliahnya, tujuan anak berkomunikasi ke ayahnya ialah agar besok sang anak dapat melakukan pembayaran uang kuliah. Dalam komunikasi tersebut sering kali fungsi linguistik yang paling dominan adalah fungsi pragmatic, atau konteks dimana bahasa tersebut digunakan. Dengan demikian komunikasi atau diskusi-diskusi yang diselenggarakan dalam warung kopi merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial. Sehingga dapat dipahami bahwa konteks penelitian ini ialah komunikasi sosial yang terjadi di warung kopi yang merupakan salah bentuk ruang publik, dengan menggunakan pendekatan teori tindakan komunikasi yang dikemukakan oleh Habermas.

Pada tahun 1980an melalui karyanya yang berjudul ***"The Theory of Communicative Action,"*** Habermas (Hardiman, 2003) mulai memberikan perhatian khusus terhadap dunia sosial dengan kembali kepada konsep Durkheim, Mead, dan Schutz. Konsep Schutz tentang dunia kehidupan ialah dunia sosial sehari-hari, lingkungan total pengalaman individu, termasuk juga pengalaman masa lalunya. Ini adalah situasi tempat masuknya individu yang mau tidak mau ditentukan secara biografis. Ini adalah dunia sebagai "yang sudah ditentukan secara apa adanya" yang di dalamnya individu berusaha merealisasikan sasaran-sasaran obyektif.



Konsep Habermas tentang dunia kehidupan ini berkaitan dengan tindakan komunikatif. Apa yang terjadi jika kita berkomunikasi? Kita mencapai kesepakatan teoritis atau praktis (Suseno, 2006 : 223). Apa kriteria yang digunakan untuk mencapai kesepakatan? Kita hanya dapat saling mengerti dan kemudian sepakat atau mencapai konsensus jika kita memiliki konteks bersama. Konteks bersama sekelompok manusia itu disebut Habermas sebagai dunia kehidupan. Dunia kehidupan (Lechte, 2007 : 286 – 287) merupakan sebuah cakrawala kesadaran yang di dalamnya terdapat baik lingkungan publik maupun pribadi. Ini adalah lingkungan pembentukan identitas dan aksi komunikatif. Komunikasi merupakan aspek terpenting dari semua kegiatan dalam dunia kehidupan karena di sini secara ideal para individu bisa mendapatkan pengakuan atas keabsahan semua ujaran mereka. Dunia kehidupan berfungsi sebagai konteks komunikasi; ia merupakan **tandon** pengetahuan dan anggapan yang perlu kita andaikan untuk mengambil sikap. Manusia dapat berkomunikasi satu sama lainnya atas dasar anggapan-anggapan yang dapat diandaikan bersama. Dunia kehidupan itu realitas sosial. Kita tumbuh ke dalamnya dalam proses sosialisasi kita, tetapi bukan berarti tidak berubah. Setiap komunikasi merubah dan memperbaharuinya. Anggapan dan penilaian-penilaian yang lama dianggap biasa, dapat dipertanyakan dan dipastikan kembali. Dengan demikian berlangsunglah



proses *rasionalisasi dunia kehidupan* berkelanjutan. Setiap perubahan sosial akan meningkatkan rasionalisasi dunia sosial. Rasionalisasi dalam dunia kehidupan juga mengenai pandangan-pandangan moral.

Semua wilayah kehidupan sosial (Hardiman, 2006 : 123) kita yang memungkinkan kita membentuk opini publik disebut sebagai ruang publik oleh Habermas. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki dunia macam itu. Mereka sebetulnya adalah pribadi-pribadi bukan dengan kepentingan bisnis atau professional, bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik, sebab bukan persoalan pribadi mereka yang dipercakapkan, melainkan soal kepentingan umum yang dibicarakan tanpa paksaan. Barulah dalam situasi tersebut berlaku sebagai publik, sebab mereka memiliki jaminan untuk berkumpul dan berserikat secara bebas dan menyatakan serta mengumumkan opini-opini mereka secara bebas pula.

Sejarah Ruang Publik dapat di lacak pada abad 18 di Benua Eropa, di Inggris abad 17, kemudian di daratan Eropa dan Amerika, yang dimulai di kota-kota Italia pada zaman Renaissance, memunculkan ruang publik borjuis, sehingga muncul bentuk pemerintahan representasi –demokrasi borjuis. Khususnya Inggris dikenal suatu taman yang dikenal dengan Nama *Hyde Park* yang merupakan tempat semua golongan masyarakat berkumpul untuk menyampaikan segala macam perasaan dan pikirannya



tentang segala macam hal. Di area ini, semua orang dapat dengan bebas menyampaikan segala macam persoalan yang terbebas dari intervensi negara (kerajaan) atau kelompok kepentingan manapun. Namun, hanya terbatas di area tersebut. Di luar area itu, maka kebebasan menyatakan pendapat akan mendapatkan pembatasan dari negara, melalui aturan-aturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang publik ini bisa bersifat politis (dalam arti praktek kekuasaan) sejauh diskusi publik itu ditujukan keberbagai hal yang menyangkut praktek Negara. Ruang publik ini menjadi kekuatan tandingan terhadap Negara. Ruang publik menjadi mediasi bagi dua pihak yang dibedakan secara analitis sebagai "Negara" dan "Masyarakat" (lihat gambar 2). Dengan demikian dimungkinkan tumbuhnya suatu lingkungan dan suasana komunikatif yang memungkinkan demokrasi dalam masyarakat. Dalam ruang publik inilah tindakan komunikatif yang tanpa tekanan dapat dicapai.

Warung Kopi dapat dianggap wilayah kehidupan sosial masyarakat Sulawesi selatan, khususnya kota Makassar. Tempat tersebut dapat diidentifikasi sebagai ruang publik yang bersifat politik, yang menjadi ruang mediasi antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh kelompok Lembaga Swadaya



Masyarakat (LSM).<sup>16</sup> Di warung kopi tersebut, peristiwa-peristiwa diskursif yang melibatkan negara (direpresentasikan oleh birokrat daerah dan anggota DPRD) dengan masyarakat (direpresentasikan oleh kelompok LSM), membahas issue-issue atau masalah-masalah sosial, politik, dan budaya yang aktual baik lokal, regional, maupun nasional. Diskusi-diskusi yang berlangsung di warung kopi Phoenam, atau warung kopi lainnya yang ada di kota Makassar, ada yang teragendakan secara rutin dan biasanya mendapatkan peliputan media. Ada pula diskusi yang berlangsung secara tak teragendakan namun kemudian berkembang dan dianggap sebagai issue yang krusial sehingga mendapatkan perhatian semua pihak untuk proses diskusi lebih lanjut, dalam bentuk diskusi yang teragendakan.

Menarik mengamati peristiwa sosial dalam bentuk interaksi di warung kopi tersebut. Terlihat suasana cair pada meja-meja yang ditata oleh pengelola warung. Seorang pengunjung yang pada awalnya asyik berdiskusi di satu meja, pada saat lain telah terlibat diskusi dengan pengunjung pada meja yang berbeda. Pengunjung pun beragam dari segi kelas sosial atau pun kelompok sosial. Hal ini terlihat dari pakaian yang dikenakan pengunjung. Ada yang mengenakan setelan safari, seragam birokrat, setelan baju dan celana bahan dengan sepatu sejenis *fantovel*,

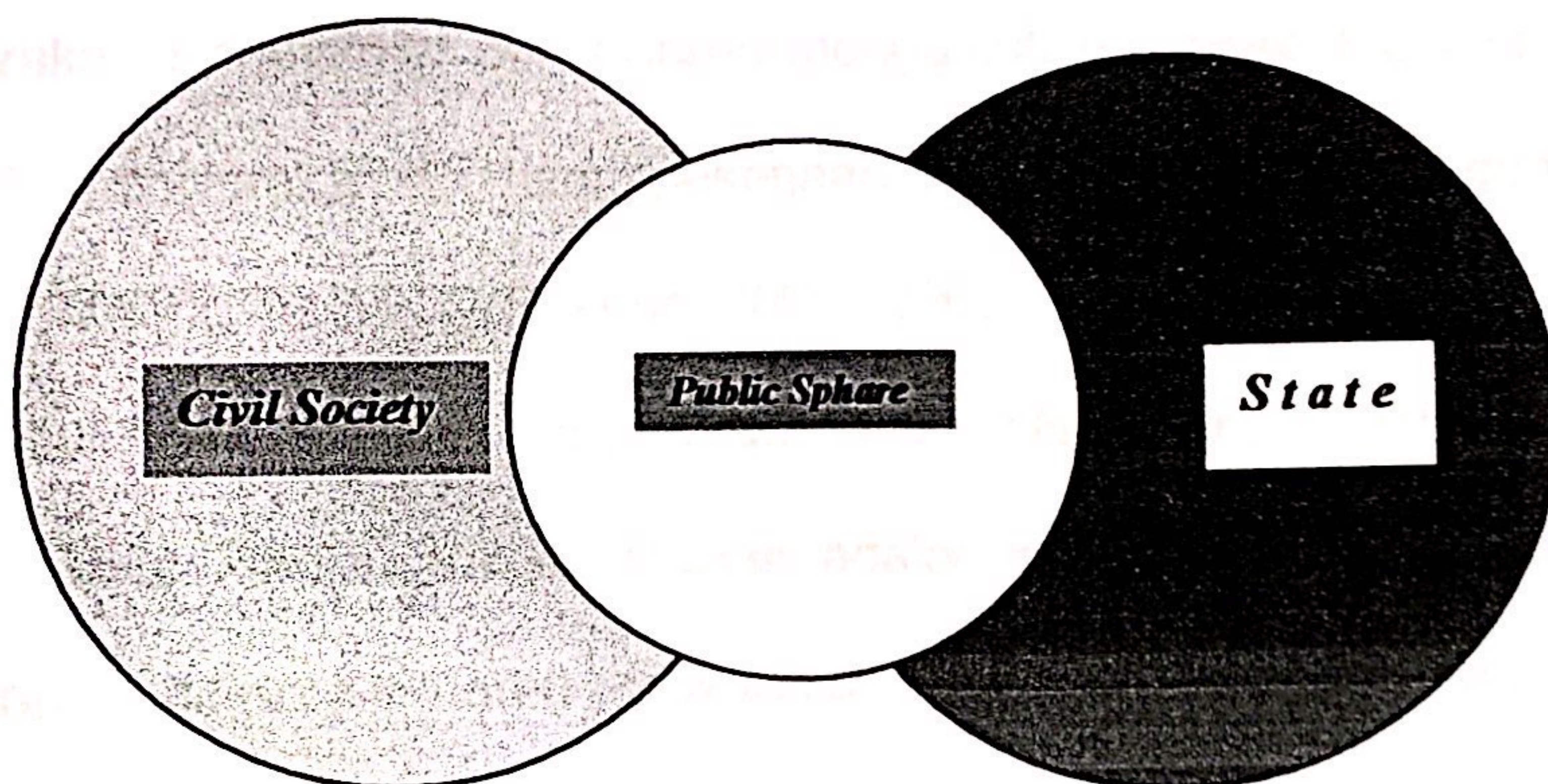
---

<sup>16</sup> Lih (Culla, 2006) LSM atau NGO merupakan representasi dari masyarakat sipil, yang kerja-kerjanya melakukan pendampingan advokasi pada kelompok-kelompok *akar rumput*.



setelan jeans – t-shirt – dengan sepatu karet atau mengenakan alas kaki berupa sandal. Bahkan ada pula yang mengenakan seragam polisi. Namun kehadiran pengunjung yang satu tidak membuat pengunjung yang sedang berdiskusi menghentikan pembicaraannya. Artinya dalam ruang tersebut diskusi berlangsung tanpa tekanan, sehingga dimungkinkan berlangsungnya tindakan komunikatif dari partisipan diskusi.

**Gambar 2: Masyarakat – Negara - Ruang Publik**



**Sumber: Culla, (2006 : 33 – 34)**

### **c. Teori Tindakan Komunikasi Habermas**

Teori tindakan komunikasi (**Theory of Communicative Action**) oleh Habermas yang bertujuan mengatasi batas Mazhab Frankfurt. Habermas mengemukakan perubahan perubahan dari "paradigma kesadaran" yang menyetujui dualitas Barat atas subjek dan objek, ke paradigma



komunikasi. Paradigma ini mengkonseptualisasikan pengetahuan dan praktek sosial bukan dalam dualitas subjek – objek, tetapi melalui suatu rekonseptualisasi ***subjek sebagai intersubjektif yang inheren***. Subjek intersubjektif ini memiliki kapasitas primer bagi komunikasi, bukan hanya kerja. Habermas percaya bahwa hanya dengan refleksi diri dan komunikasi orang dapat benar-benar mengontrol nasib mereka dan merestrukturisasi masyarakat secara manusiawi. Habermas menolak pandangan Horkheimer dan Adorno. Dalam analisis tentang rasionalitas masyarakat, Horkheimer dan Adorno mengikuti anggapan Marx bahwa manusia menciptakan diri dalam pekerjaan. Menurut Habermas anggapan tersebut kurang memadai (Suseno, 2006 : 220).

Untuk menjelaskan itu, Habermas (Hardiman, 2003 : 71) menggunakan konsep praksis. Praksis adalah tindakan dasar Manusia di luar dirinya, dalam alam atau masyarakat. Ada dua dimensi dalam praxis hidup Manusia. Satu tidak dapat dikesampingkan Demi yang lainnya, yakni “kerja” dan “interaksi” atau “komunikasi”<sup>17</sup>. Pekerjaan merupakan sikap manusia terhadap alam. Ada subjek aktif, manusia. Ada objek yang pasif, alam. Hubungan antar manusia tidak dapat dimengerti menurut pola ini. Hubungan antar manusia adalah hubungan antara dua subjek yang sama kedudukannya, kedua-duanya baik aktif maupun pasif. Hubungan

---

<sup>17</sup> Lih; (Suseno, 2006) dan (Lechte, 2007)



antar manusia ini merupakan terjemahan dari interaksi dimana interaksi membutuhkan komunikasi yang disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif.

Rasionalitas pekerjaan adalah rasionalitas sasaran. Pekerjaan itu rasional apabila sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tetapi hubungan manusia melalui tindakan komunikatif bersifat lain. Komunikasi bukan monologis, tetapi dialogis. Bukan individualistik tetapi sosial. Dalam komunikasi satu partisipan tidak menggunakan partisipan lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing (tindakan strategis). Namun mengkoordinasikan rencana tindakan mereka. Masing-masing partisipan mengambil peran partisipan lainnya. Menurut Habermas "Dengan mengambil alih peran orang lain, saya dapat merefleksikan diri saya sendiri dengan demikian mengarahkan proses komunikasi saya." Sebuah komunikasi itu rasional apabila saling pengertian tercapai. Itulah rasionalitas komunikatif. Komunikasi harus dibedakan dengan tindakan strategis. Tindakan strategis berasionalitas sasaran, sama dengan pekerjaan. Dalam tindakan strategis kita ingin mengendalikan lawan bicara kita. Jadi tindakan itu monologis. Tindakan strategis bukanlah komunikasi dalam arti yang sebenarnya, karena tujuan adalah hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam komunikasi, konsensus bersama



yang menjadi tujuan dimana pembicaraan pada permulaan masih bersifat terbuka.

Lebih lanjut dijelaskan Agger (2004) dengan mengambil gagasan Hegel dalam buku *Phenomenology of Mind*, **Teori Komunikasi**, dan **Teori Tindakan berbicara**, Habermas berpandangan bahwa orang memanusiawikan dirinya melalui interaksi. Hanya dengan komunikasi dan interaksi manusia dapat menguasai masyarakat, membentuk gerakan sosial, dan meraih kekuasaan. Niat dasar komunikasi ialah membentuk konsensus melalui diskusi rasional antara *interlokutor* (penutur dan penulis) yang tidak memaksa satu sama lain, yang membuat pernyataan "tentu saja" (*of course*), dengan menggunakan ideologi tertentu untuk tujuan penipuan mengalami kegagalan. Teori Habermas tentang tindakan komunikatif ini, kemudian mengatasi romantisme dan utopianisme teoritis Frankfurt dan mengubah teori kritis dari paradigma kesadaran pada paradigma komunikasi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Agger (2004) bahwa Habermas dikritik dari berbagai sisi. Fraser berpandangan bahwa konsepnya tentang dunia kehidupan tidak secara eksplisit memasukkan perempuan dan jender, meskipun satu contoh gerakan sosial barunya adalah gerakan perempuan. Dari sudut pandang Marxisme tradisional, Habermas dikritik dengan klaim bahwa pandangannya tentang komunikasi mengabaikan



kekuasaan yang tidak berdasar pada komunikasi. Hal ini dijawab oleh Habermas dalam karyanya *Legitimation Crisis* (1975) dengan berpendapat bahwa manifestasi krisis struktural yang diantisipasi Marx sebagai artikulasi logika kontradiksi kapital terjadi terutama pada wilayah politik, negara kini diasumsikan sebagai yang bertanggungjawab atas penanganan krisis ekonomi.

Dijelaskan oleh Habermas (McCarthy, 2004 : 378 – 379) diskursus adalah bentuk komunikasi yang "aneh dan tidak nyata" dimana partisipan mengikat diri mereka pada "kekuatan argumen yang lebih baik tanpa ada paksaan," dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang kevalidan atau ketidakvalidan klaim-klaim (idea-idea) yang menjadi persoalan. Dalam proses tersebut diandaikan kalau mewakili "konsensus rasional," yaitu kesepakatan dicapai (yang akan menjadi pendapat umum) bukan karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu atau keistimewaan situasi yang dihadapi, namun semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kesepakatan (yang akan menjadi pendapat umum) dipandang valid bukan hanya bagi kita (partisipan sebenarnya) namun juga dipandang valid "secara obyektif," valid bagi semua subjek rasional (sebagai partisipan potensial). Lebih jauh dikatakan bahwa institusionalisasi diskursus dimana validitas klaim



persoalan praktis dan keputusan politis hendaknya terus-menerus dipertanyakan dan diuji; Bagi Habermas (McCarthy, 2004), diskursus merupakan "syarat bagi yang tak bersyarat," untuk konsensus rasional.

Lebih lanjut dijelaskan (Suseno, 2006) bahwa, siapapun yang masuk dalam suatu pembicaraan, selalu sudah mengandaikan empat klaim: **Kejelasan (*understandability*)**; "*aku mengungkapkan diri dengan jelas sehingga apa yang mau dikatakan dapat dimengerti*" – **Kebenaran (*truth*)**; "*aku mau menyampaikan sesuatu*" – **Kejujuran (*truthfulness*)**; "*aku mau mengungkapkan diriku - dan ketepatan atau pengertian bersama (*rightness*); "*omonganku harus cocok dengan norma-norma komunikasi, kita harus mau mencapai saling pengertian*". Secara sederhana, diterjemahkan oleh Suseno (2006) supaya komunikasi apapun dapat berhasil orang harus berbicara **jelas, benar, jujur, dan tepat**.<sup>18</sup> Sehingga seseorang yang mau berkomunikasi sudah mempunyai pengertian intuitif tentang rasionalitas komunikasi. Tidak rasional jika menyangkal salah satu klaim tersebut. Karena, kalau kita ingin mencapai suatu pengertian bersama, misalnya strategi mana yang akan kita pakai untuk memenangkan sebuah pertandingan, namun salah satu di antara peserta berbohong (melanggar klaim nomor tiga) atau tidak memperhatikan pendapat peserta yang lain (melanggar klaim nomor*

---

<sup>18</sup> Dalam Littlejohn & Foss (2008), dijelaskan ada 3 kriteria, yakni jujur, tulus, dan tepat. Sehingga penulis memaknai benar dan jelas sebagai satu kesatuan dalam makna tulus.



empat), pengertian bersama tidak mungkin dapat dicapai. Keberhasilan komunikasi juga ditentukan oleh pengakuan terhadap keempat klaim tersebut yang tidak dapat direkayasa atau dipaksakan, komunikasi bebas dari kekuasaan.

Persoalannya (Suseno, 2000 : 223 – 230) adalah ketika kita berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan, apakah kriteria untuk mencapai kesepakatan itu? Manakah kerangka acuan agar kita dapat sepakat? Menurut Habermas kita hanya dapat saling mengerti dan sepakat apabila kita mempunyai konteks bersama, yang disebut sebagai dunia kehidupan (*world view*). Ini merupakan cakrawala pengetahuan-pengetahuan, nilai dan norma-norma, dan merupakan latar belakang pendapat dan penilaian-penilaian kita. Dunia kehidupan merupakan *tandon* anggapan-anggapan latar belakang yang diorganisasikan dalam bahasa, yang mereproduksi diri dalam bentuk tradisi kultural. Ia berfungsi sebagai konteks komunikasi. Manusia dapat berkomunikasi satu sama lain atas dasar anggapan-anggapan yang dapat diandaikan bersama.

Menurut Habermas (Suseno, 2000) Analisis Habermas terhadap rasionalitas komunikatif, khususnya terhadap implikasi kemampuan manusia untuk berwacana, sudah memperlihatkan suatu yang sangat mendasar; bahwa bahasa selalu merupakan tindakan komunikatif, bahkan



jika hanya berbahasa dalam dalam pikiran dan batin orang. Oleh sebab itu, tidaklah memadai jika kesadaran moral individu di jadikan tolok ukur pembenaran keharusan moral (sesuatu yang dikonsensuskan). Jadi yang disepakati sebagai norma dalam pembicaraan bersama, menjadi ukuran keberlakuan universal. Hal ini menandai perubahan paradigma secara radikal yang dilakukan oleh Habermas dari "filsafat subjek" ke "filsafat komunikasi", yakni dari pemusatan perhatian pada subjek ke komunikasi. Sehingga tolok ukur kesadaran individu oleh Kant diubah menjadi peraturan argumentasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peraturan argumentasi menjadi kriteria kesepakatan, apabila mengadakan diskursus tentang **sesuatu** hal, Habermas memperkenalkan prinsip penguniversalisasian "**U**" sebagai berikut:

Sebuah norma moral hanya boleh dianggap sah kalau akibat dan efek-efek sampingan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemuasan kepentingan siapa saja andaikata norma itu ditaati secara umum, dapat disetujui tanpa paksaan oleh semua.

Untuk memastikan semua yang terlibat dalam diskursus memang menyetujui akibat dan efek-efeknya dari **sesuatu** itu jika diberlakukan secara universal, hanya dengan cara, yakni diskursus argumentatif



bersama. Untuk itu, Habermas memperkenalkan etika diskursus "D" sebagai berikut:

Hanya norma-norma yang disetujui (atau dapat disetujui) oleh semua semua yang bersangkutan sebagai peserta diskursus praktis boleh di anggap sah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Habermas (Suseno, 2000) bahwa orang hanya dapat mengikuti suatu diskursus apabila ia bersedia menerima peraturan-peraturan diskursus berikut:

- a. Setiap subjek yang bisa bicara dan bertindak boleh ikut dalam diskursus.
- b. Dalam diskursus tersebut:
  - a) setiap peserta boleh mempersoalkan setiap pernyataan.
  - b) Setiap peserta boleh memasukkan setiap pernyataan ke dalam diskursus.
  - c) Setiap peserta boleh mengungkapkan sikap-sikap, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Tidak boleh ada pembicara dihalangi dengan paksaan baik dalam, maupun di luar diskursus untuk melaksanakan hak-haknya yang dirumuskan pada point a dan b.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan ikut dalam sebuah diskursus dan sekaligus menyangkal keberlakuan peraturan-peraturan itu,



merupakan kontradiksi. Orang hanya dapat menyangkal peraturan-peraturan diskursus, apabila ia diizinkan mendasarkan diri pada peraturan-peraturan yang mau disangkal itu. Jika satu saja dari peraturan-peraturan itu tidak diterima, ia tidak dapat menyatakan penyangkalannya. Jadi menyangkal peraturan-peraturan diskursus merupakan kontradiksi performatif. Karena tindakan, *performance*, itu sendiri kontradiktif; penyangkalan hanya mungkin apabila apa yang disangkal berlaku.

Dalam konteks diskursus di warung kopi, maka konteks bersama (*world view*) peserta komunikasi dalam warung kopi di kota Makassar adalah kebiasaan berkumpul untuk membicarakan berbagai persoalan yang disebut sebagai *tudang sipulung* (duduk berkumpul) di warung kopi. Dimana dalam warung kopi tersebut setiap orang dapat mengungkapkan pernyataan-pernyataannya dan kesamaan konteks bersama tersebut menjadi kriteria untuk mencapai kesepakatan.

#### **d. Opini Publik dan Warung Kopi**

Opini publik selalu identik dengan konsep demokrasi. Selama ini konsep demokrasi selalu dihubungkan dengan pemerintahan kota zaman Yanani Kuno, yang diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat dan juga politik modern, maka kata demokrasi yang tadinya adalah kata sederhana sebagai



pemerintahan rakyat mengalami banyak modifikasi. Disimpulkan oleh Cangara (2009 : 63 – 72) bahwa konsep demokrasi semacam ini dipahami sebagai konsep demokrasi klasik, yang diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan banyak pihak (*rule by the many*) atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat (*rule by the people*). Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni representasi dan partisipasi. Representasi merujuk pada pertimbangan kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan dan keikutsertaan publik pada aktifitas politik.

Demokrasi sebagaimana pada zaman Yunani (demokrasi klasik), nampaknya sulit untuk ditemukan. Bahkan dapat dikatakan tidak dapat ditemukan lagi. Menurut Awuy (Parera dan Koekerist, 1999 : 152 – 153) pengertian demokrasi tidak bisa ditarik dari istilah 'rakyat' (*demos*) saja. Ia pada hakekatnya merupakan modus eksistensi manusia. Dalam modus ini, demokrasi menampilkan dua dimensi; pertama sebagai sebuah sistem, dan kedua sebagai sikap.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem dapat dipahami melalui aturan-aturan yang disepakati bersama yang bisa meliputi berbagai unsur kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hal ini harus bisa mengendalikan egoisnya. Ia harus dapat mengadaptasikan diri terhadap



sistem yang berdasarkan kesepakatan sosial tersebut. Dia bergerak di bawah atau di atas sistem tersebut.

Sedangkan demokrasi dilihat sebagai sikap lebih ditekankan pada pola pikir yang bersifat sangat individual. Manusia memiliki potensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan potensi ini menunjukkan bagaimana setiap individu bebas memilih jalan hidup, keinginan, atau cita-cita sesuai dengan potensinya itu. Ditambahkan bahwa kedua dimensi tersebut saling mengisi dengan prasyarat adanya saling menghargai dan menghormati potensi masing-masing. Sikap menekan atau menindas orang lain, apalagi menganggap sebagai budak sudah tentu berlawanan dengan jiwa demokrasi. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin penuh potensi individual manusia, menyediakan ruang bagi setiap manusia untuk mengaktualisasikan potensinya tersebut.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam demokrasi baik sebagai suatu sistem maupun sebagai suatu sikap merupakan pandangan yang menghargai perbedaan (pluralisme), namun melakukan suatu tindakan tertentu atas dasar konsensus bersama. Artinya sebagai suatu sistem, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam sistem demokrasi harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan dalam masyarakat. Tanpa hal tersebut, maka sistem tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu sistem demokrasi.



Marijan (2010 : 111 – 113) mengatakan bahwa partisipasi merupakan elemen dasar dari demokrasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa partisipasi publik ini diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Partisipasi publik acap kali ditekankan pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik, seperti terlibat dalam pertemuan-pertemuan publik, melakukan inisiatif, dan referendum. Kebijakan publik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat (warga negara), sehingga dalam perumusannya dibutuhkan partisipasi publik. Partisipasi publik dapat dilakukan di ruang publik.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Huntington (Cangara, 2009) bahwa dalam pandangan barat, demokrasi adalah suatu sistem politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur, tetapi juga ditandai dengan pemisahan yang tegas kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggaraan kekuasaan yang diatur dengan hukum, melindungi kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan hak-hak pribadi seseorang. Oleh sebab itu esensi demokrasi menurut Young (Cangara : 2009) demokrasi merupakan proses penyelesaian suatu yang ideal yang tidak pernah tercapai secara penuh, namun demikian dalam demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan pers, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.



Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi selalu dihubungkan dengan kepentingan umum (publik), dimana perumusan berbagai kebijakan yang bersifat publik menyertakan dukungan publik, melalui penggalangan opini publik. M Ryaas Rasyid dalam pengantar buku karya Culla ( 2006 : xxv) menyatakan bahwa ruang publik merupakan forum dalam kehidupan sosial warga negara yang menjadi tempat opini publik yang berkenaan dengan berbagai kepentingan umum bisa terbentuk secara jernih dan obyektif. Di ruang publik ini dapat berlangsung berbagai tataran diskusi yang intensif tentang berbagai isu kepentingan umum. Dari ruang publik itu pula segala pandangan kritis, segala keinginan dan kesepakatan masyarakat dikomunikasikan kepada negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ( 2006 : xxv) Sistem demokrasi yang sehat memang seyogyanya terus menerus memelihara hubungan yang harmonis dan produktif antara negara dan *civil society*. Di sini negara tidak perlu lagi berhadapan dengan *civil society* secara antagonistik, walaupun tidak secara otomatis bahwa harus terjadi reintegrasi antara keduanya. Ruang Publik yang berlokasi antara negara dan *civil society*, memainkan peran kunci dalam menjembatani dua benua yang cenderung terpisah itu (lihat, gambar 2).

Uraian tersebut menghantarkan pada pemahaman bahwa demokrasi sebagai suatu sistem merupakan suatu paham atau ideologi yang



mengatur kehidupan sosial dalam berbagai bidang seperti, kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Untuk tegaknya sendi-sendi demokrasi tersebut dibutuhkan prasyarat, yakni adanya pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan publik. Diskusi-diskusi yang terjadi di tengah masyarakat tentang berbagai masalah publik dapat disebut sebagai salah satu bentuk partisipasi. Diskusi ini dapat saja terjadi melalui perang opini melalui media, sebagai salah satu bentuk ruang publik. Atau pun warung kopi yang merupakan bentuk lain dari ruang publik tersebut. Dalam perkembangannya, arena yang tadinya dianggap arena ideal untuk menumbuhkan semangat demokratisasi, dapat saja dikooptasi atau bahkan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai alat legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh kelompok tersebut.

Hasil dari suatu diskusi dalam suatu ruang publik identik dengan opini publik. Opini publik harus dibedakan dengan opini personal. Dijelaskan oleh McQuail (2010) bahwa opini personal merupakan sebuah pernyataan preferensi terhadap satu pihak argumen atau pilihan tertentu. Opini ini bersifat kognitif sekaligus evaluatif. Selain itu, opini memiliki karakter yang spesifik dan sementara, dan seseorang dapat memiliki banyak opini atas topik-topik yang berbeda tanpa perlu adanya kohesi. Artinya opini/pendapat personal sangat mudah untuk berubah



Sementara Doob dalam Eriyanto (1999 : 3) menyatakan bahwa pendapat umum (opini publik) diartikan sebagai apa yang dipikirkan, sebagai pandangan dan perasaan yang sedang berkembang dikalangan masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian rakyat yang diekspresikan dan diungkapkan. Jika tidak diekspresikan dan diungkapkan, hanyalah merupakan pendapat pribadi.

Lebih lanjut dijelaskan Eriyanto (1999 : 4) bahwa inti dari pendapat umum ialah diakuinya pendapat masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kata **diungkapkan** mengandung makna bahwa pandangan dan perasaan yang berupa idea yang terdapat dalam pikiran seseorang atau banyak orang mestilah diungkapkan dalam suatu ruang terbuka yang memberi peluang agar idea (pandangan dan perasaan) tersebut dapat diketahui dan menyebar. Sementara kata **diekspresikan** berarti bahwa idea (pandangan dan perasaan) itu, mestilah melalui suatu mekanisme perdebatan dalam suatu ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk mendiskusikan idea tersebut. Dengan demikian, idea berupa pandangan dan perasaan sekelompok individu dapat menjadi pandangan banyak orang atau opini publik.

Sementara Lippmann (1998) menjelaskan bahwa ada dua pendapat umum. Pendapat umum yang ditulis dalam huruf kecil merupakan gambaran-gambaran dalam benak kita tentang diri sendiri dan orang lain,



serta gambaran orang tentang diri mereka atau tentang kita, keperluan-keperluannya, maksudnya, dan hubungannya dengan masyarakat luas. Sementara Pendapat Umum dalam huruf besar merupakan gambar-gambar yang digerakkan oleh sekelompok orang, atau pribadi yang bertindak atas nama kelompok.

Dalam bukunya "Opini umum", terjemahkan oleh S Maimoen (1998) Lippmann menjelaskan bahwa opini umum (opini Publik) memang diperlukan oleh untuk pengambilan keputusan. Namun tidak ada jaminan bahwa bahwa opini umum tersebut dapat memenuhi keseluruhan kepentingan masyarakat (umum), karena sumber-sumber hajat hidup orang banyak dikuasai oleh golongan tertentu dalam masyarakat. Diakui bahwa dalam sistem demokrasi, suara mayoritas yang menentukan, dan suara mayoritas selalu dikaitkan dengan dengan opini umum. Namun Opini umum tersebut perlu dikritisi, karena belum tentu opini umum tersebut merupakan representasi mayoritas suara dalam masyarakat. Karena perekrayasaan opini umum ini, sering kali terjadi.

Hal ini dijelaskan oleh Lipman dengan menjelaskan 'lingkungan palsu' yang sangat kental dengan pengaruh Freud dalam bukunya *Interpretation of Dreams (1912)*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 'lingkungan palsu' atau gambaran dalam kepala manusia sebagian diakibatkan oleh sensor, tetapi lebih banyak oleh kemalasan manusia dengan cara



menyederhanakan segala sesuatu yang dianggap rumit dan rasa takut untuk menghadapi fakta yang merusak kepercayaan dan keyakinan yang selama ini dipelihara. Gambaran tentang lingkungan, sedikit banyak dibuat oleh manusia sendiri, melalui mitos dan simbol-simbol. Mitos dan simbol ini membantu terbentuknya stereotip mental. Namun simbol-simbol tidak mewakili gagasan logis tertentu, lebih tepat sebagai persimpangan antara gagasan. Sementara mitos-mitos tidak pernah memiliki daya kritis untuk mempersoalkan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga menurutnya, untuk memahami kepentingan publik diperlukan dinas intelejen untuk memberikan fakta-fakta, yang kemudian dipetakan dan diberi penilaian oleh para ahli dan kelompok independen. Kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, seperti LSM diperlukan untuk melaporkan realitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan opini publik yang terbentuk dalam ruang publik belum tentu menjadi suara mayoritas dalam masyarakat, dan juga belum tentu merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Namun jika, opini publik yang terbangun dalam ruang publik, mengikuti prinsip-prinsip rasionalitas komunikasi sebagaimana dalam paradigma komunikasi yang dikemukakan oleh Habermas, maka dapat diminimalkan terjadinya



rekayasa dalam proses terbentuknya opini publik. Demikian halnya yang terjadi di warung kopi di kota Makassar.

Dijelaskan Eriyanto bahwa sejarah pendapat umum, dapat dilacak sejak pertemuan kota (1999 : 5 – 7), namun revolusi pendapat umum dalam pengertian modern baru dikenal pada abad 18. Pada era itu, suara rakyat mulai dipandang sebagai bagian penting dari pengambilan kebijakan publik yang diwarisi hingga kini. Pada masa sebelumnya, apa yang dipikirkan dan menjadi pandangan masyarakat, tidak digubris oleh pihak penguasa. Masyarakat tidak memiliki cara untuk membuat pendapatnya diketahui atau diterima dalam menentukan kebijakan. Pengaruh tokoh-tokoh pemikir pada periode 1650 – 1800, yang mengajukan gagasan pembatasan kekuasaan, memunculkan idea mengenai suara rakyat untuk memegang kekuasaan, dimana pemerintahan didukung oleh suara rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan.<sup>19</sup>

Lebih lanjut dijelaskan Eriyanto (1999 : 3) bahwa ekspresi untuk menyatakan pendapat dari satu masa ke masa lain, bergantung pada bagaimana paham demokrasi dan kemajuan teknologi pada masa yang bersangkutan. Dalam sejarah dikenal tehnik ekspresi pendapat menjadi pendapat umum antara lain: orator, cetakan, kerumunan, petisi, ruang

---

<sup>19</sup> Baca; Paham demokrasi



diskusi, **coffee house**, gerakan revolusi, pemogokan, pemilihan umum, pemungutan suara tak resmi (**straw polls**), surat kabar modern, dan **polling**.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pemerintahan dikatakan sebagai pemerintahan yang berazaskan paham demokrasi, jika pemerintahan itu mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Artikulasi pendapat masyarakat dalam bentuk pendapat umum, bagi tatanan pemerintahan yang menganut paham demokrasi menjadi suatu keharusan. Karena dengan pendapat umum, dapat diketahui dukungan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Selain itu, pendapat umum juga dapat dijadikan referensi atau acuan bagi pemerintahan yang sedang berjalan dalam menyusun kebijakan publik. Namun harus ditegaskan bahwa pendapat umum sebagai mana yang dimaksud adalah pendapat umum yang terbebas dari distorsi komunikasi, bebas dominasi. Artinya bahwa pendapat umum tersebut adalah hasil dari tindakan komunikasi yang genuine. Sehingga, dalam situasi seperti itu, pemerintahan tersebut dikatakan sebagai pemerintahan yang yang "benar-benar" berazaskan demokrasi. Pertanyaannya ialah apakah masih dimungkinkan pendapat umum yang demikian itu yang dapat menjadi terlaksananya pemerintahan yang demokratis? Ataukah hal tersebut hanyalah sekedar mitos yang



dilanggengkan<sup>20</sup> oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan penggalangan opini publik, guna mengamankan kebijakan yang menguntungkan kepentingan kelompok yang bersangkutan? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam diskusi berbagai pihak di Warung Kopi, kota Makassar.

Dalam hubungannya dengan rasionalisasi kekuasaan, Habermas mengangkat issue demokrasi dalam arti bentuk-bentuk komunikasi umum dan publik yang bebas dan terjamin secara institusional (Hardiman, 2003 : 128 -130). Menurutnya hanya kekuasaan yang ditentukan oleh diskusi publik yang kritis merupakan kekuasaan yang dirasionalisasikan. Diskusi semacam itu hanya mungkin dilakukan dalam suatu wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itu disebutnya sebagai ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan terbentuknya opini publik. Ruang publik ini bisa bersifat politis (dalam arti praktek kekuasaan) sejauh diskusi publik itu ditujukan keberbagai hal yang menyangkut praktek Negara.

Ruang publik ini menjadi kekuatan tandingan terhadap Negara. Ruang publik menjadi mediasi bagi dua pihak yang dibedakan secara analitis sebagai "Negara" dan "Masyarakat". Dengan demikian dimungkinkan tumbuhnya suatu lingkungan dan suasana komunikatif

---

<sup>20</sup> Baca : Hegemoni



yang memungkinkan demokrasi dalam masyarakat. Dalam ruang public inilah tindakan komunikatif yang tanpa tekanan dapat dicapai. Lebih lanjut di jelaskan (Hardiman, 1993: 128-129) bahwa konsep ruang publik muncul dalam pemikiran Habermas tentang harapan akan adanya suatu kondisi atau suatu dunia (ruang) di mana terjadi suatu komunikasi yang bebas dari dominasi, suatu *uncoersive communication*, di dalam masyarakat. Diskusi yang semacam itu hanya mungkin muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itulah yang disebut dengan *public sphere* (ruang public).

Habermas (1997) menyatakan bahwa semua individu berhak dan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam ruang publik tersebut. Mereka-mereka itu pada dasarnya adalah individu privat, bukan dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu. Adanya jaminan bagi mereka untuk berkumpul dan mengekspresikan ide dan gagasan serta pendapat secara bebas tanpa ada perasaan takut atau tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut dijelaskan (1997: 27),

The bourgeois public sphere may be conceived above all as the public sphere of private people come together as public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor.



Adapun kriteria suatu ruang publik, menurut Habermas (1997 : 105) harus memenuhi persyaratan tertentu dengan menyatakan sebagai berikut:

A domain of our social life where such a thing as public opinion can be formed (where) citizens... deal with matters of general interest without being subjected to coercion...(to) express and publicize their views.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan komunikatif adalah suatu aksi yang mengandalkan proses kooperatif dimana para peserta secara serentak mengaitkan diri dengan suatu yang ada pada sasaran, yang sosial, dan dunia subyektif yang bebas dari tekanan. Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka warung kopi di kota Makassar, merupakan ruang publik, sebagai tempat dimana tindakan komunikatif dilakukan yang diidealisasikan sebagai arena pertukaran wacana antara berbagai komponen dalam masyarakat di kota Makassar untuk mencapai demokrasi yang lebih substantansial, sehingga tercipta Tata Pemerintahan yang Baik.

Lebih dari 30 tahun kekuasaan Orde Baru yang dikomandoi oleh Jendral Soeharto, atas nama Demokrasi Pancasila dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang bersifat mobilisasi. Bukan atas kesadaran diri. Pada masa tersebut, media sebagai ruang publik, yang seharusnya menjadi arena ideal bagi diskursus berbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat,



dikendalikan oleh rezim Orde Baru. Bisa dikatakan bahwa hanya beberapa media yang dapat eksis di zaman itu, yakni media yang mampu menjaga diri dari pembreidelan. Obrolan-obrolan kritis di tempat-tempat publik sangat jarang ditemukan. Jika pun ada, maka aktor-aktor yang terlibat dalam obrolan atau diskusi-diskusi tersebut, akan mendapatkan lebling tertentu dan mendapatkan pembatasan ruang gerak. Semisal Petisi 88.

Sejalan dengan bergulirnya roda reformasi yang tujuannya melakukan pembebasan, media bermunculan ibarat jamur di musim hujan. Tidak hanya cetak, tetapi juga elektronik. Selama lebih dari 30 tahun, suara yang didengar masyarakat Indonesia, hanyalah "satu bunyi", mendadak menjadi beraneka ragam. Tidak hanya "do sampai do" (area publik), terkadang yang tak ada dalam tangga nada pun menjadi ada (area privat). Sejatinya, media massa menjadi ruang bagi publik untuk menyampaikan segala macam gagasan, pemikiran, tentang masalah publik secara bebas untuk kemudian berproses menjadi opini publik. Permasalahannya, satu di antara berbagai alasan yang mendasar untuk menyatakan bahwa media massa sebagai ruang publik yang ideal ternyata tidak terpenuhi atau sulit untuk dipenuhi, yakni masalah akses. Tidak semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses media massa. Media massa cenderung melakukan seleksi



terhadap siapa-siapa yang berhak atau boleh memiliki akses terhadap media tersebut.

Ruang yang terbatas di dalam media massa juga seringkali dijadikan dalih bagi media massa untuk tidak menyediakan ruangan bagi dunia publik. Ruangan yang dimiliki oleh media massa mayoritas sudah dikavling oleh program-program media yang bersangkutan, bahkan seringkali ruangan tersebut telah dipesan oleh para pengiklan. Jadi tidak tersisa lagi bagi ruang public, jika pun ada sangat terbatas. Ruangan-ruang media massa selalu penuh oleh program-program yang berisikan kepentingan para pemilik media (Lihat Pansen, 2006), pemodal, politisi, dan pengiklan. Bagi siapa-siapa yang memiliki kapital, maka dia memiliki akses yang lebih luas terhadap media massa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kapital tersebut.

Manakala yang terjadi adalah hal seperti itu, demokrasi tidak lebih dari sekedar sebuah mitos, yang dipahami sebagai "kekuasaan rakyat" namun berbeda dalam implementasinya. Demokrasi yang seperti ini, dipahami sebagai demokrasi yang elitis dan prosedural tidak bersifat substantif. Dimana partisipasi rakyat hanya dibutuhkan hanya dan hanya jika pada saat pemilu. Partisipasi yang terjadi adalah partisipasi semu atau artifisial. Bukanlah partisipasi yang sesungguhnya. Sehingga menjadi menarik untuk menemukan ruang public yang ideal, yang bebas dari



kuasa, kepentingan kelompok tertentu, pengusaha, yang menjadi wadah pertemuan berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat untuk mendiskusikan masalah publik, menjadi opini publik, sehingga memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik. Bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Habermas, Tindakan komunikasi yang terjadi di ruang publik, tidak selamanya bersifat *genuine*. Bisa terjadi tindakan komunikasi dalam bentuk lain, yakni dapat saja tindakan strategis secara terbuka, yaitu secara terbuka aktor komunikasi melakukan penekanan (fisik maupun psikologis) kepada aktor lainnya agar mendukung sikap atau ide yang dikembangkan aktor yang bersangkutan. Hal ini lazim terlihat pada tindakan-tindakan yang koersif dari seseorang atau sekelompok orang kepada kelompok atau orang lainnya. Ataupun tindakan strategis terserbunyi, yang terdiri dari dua kemungkinan, yakni komunikasi terdistorsi secara sistematis atau terjadi manipulasi.

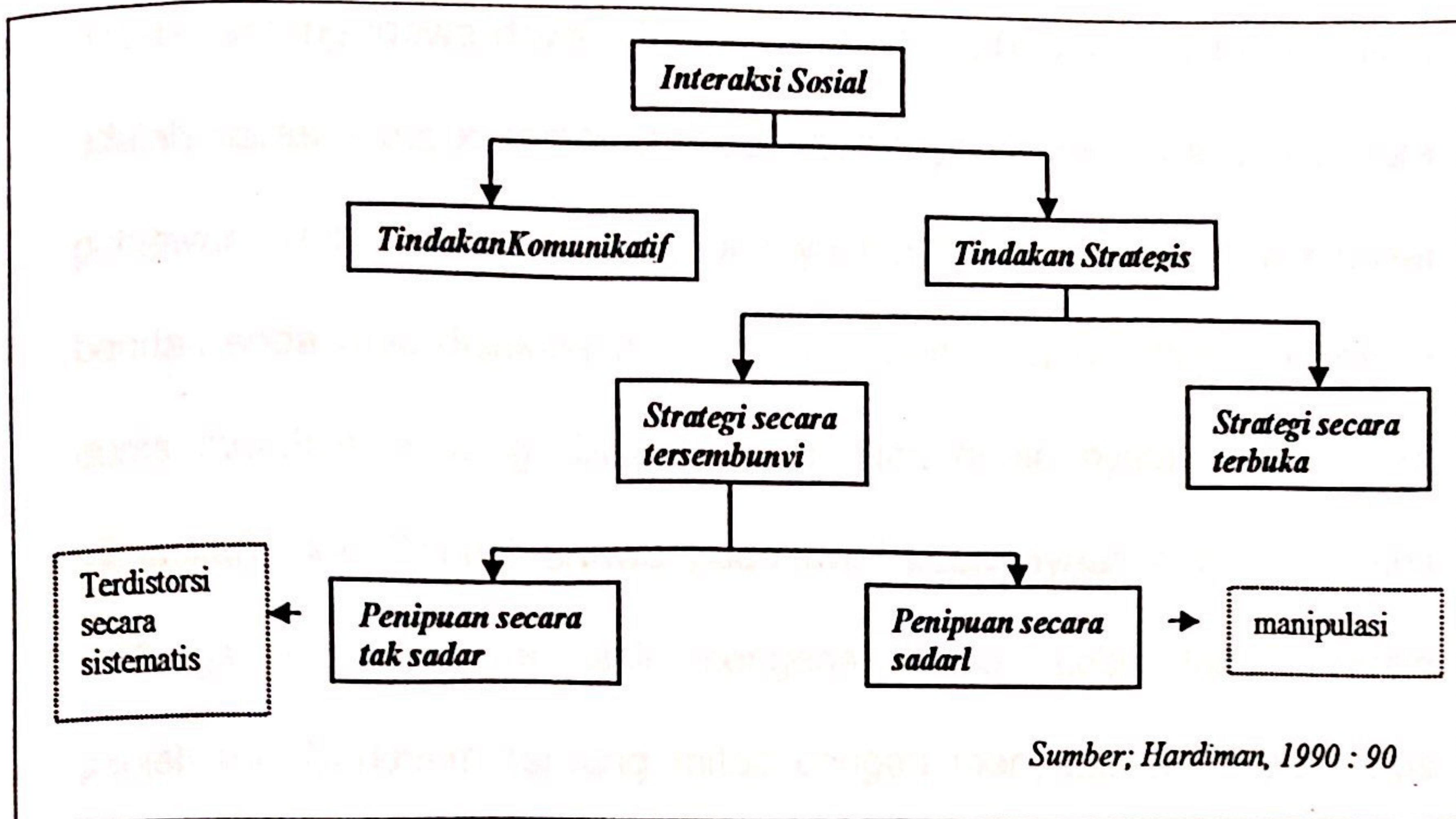
Dihubungkan dengan interaksi di Warung Kopi, di kota Makassar, manipulasi terjadi, manakala aktor yang terlibat dalam proses diskusi di warung kopi tersebut, melakukan teknik-teknik persuasi dalam mempengaruhi aktor lainnya. Biasanya sang aktor menggunakan analogi, statistik, kesaksian, kutipan, muslihat atau semua teknik tersebut



sekalipun. Misalnya saja dengan menyampaikan janji-janji tertentu sebagai iming-iming kepada aktor lainnya, agar yang bersangkutan mengikuti ide atau pendapat aktor yang bersangkutan. Atau interaksi para aktor secara sadar menipu diri mereka sendiri seakan-akan tidak bertindak secara strategis sementara menampakkan diri mereka seolah-olah ingin mencapai saling pemahaman. Dalam proses diskusi ini, terkesan yang dikemukakan, aktor yang bersangkutan adalah argumentasi logis, tetapi tidak memberi peluang kepada aktor yang lainnya untuk melakukan kritisi terhadap apa yang dikemukakannya. Inilah dikatakan sebagai ***Komunikasi terdistorsi secara sistematis***. Proses ini disajikan dalam gambar 2, hal ini akan dijelaskan pada sub judul selanjutnya.



**Gambar 2: Tindakan Komunikasi dan Tindakan Strategis**



**e. Kritik Ideologi, Mitos dan Rasionalitas Komunikasi dalam Masyarakat**

Kata mitos selalu dihubungkan dengan hal yang bersifat dogmatis, kebanyakannya dianggap tidak masuk akal, namun tidak untuk dipertanyakan. Hal ini bertentangan dengan rasionalitas. Dalam kata rasionalitas, selalu dihubungkan dengan hal-hal yang argumentatif. Jadi kata rasionalitas sangat bertentangan dengan mitos. Teori Tindakan komunikasi yang mengusung konsep rasionalitas komunikasi sebagai suatu hasil dari interaksi sosial yang bersifat genuine merupakan salah satu dari aliran teori kritis. Dalam teori kritis, mitos dianggap sebagai produk kelas sosial tertentu untuk melakukan dominasi.



Kata Mitos berasal dari bahasa Yunani *mythos* "kata", "ujaran", "kisah tentang dewa-dewa" (Danesi, 2010 : 206-207). Sebuah mitos adalah narasi yang karakter-karakter utamanya adalah para dewa, para pahlawan, dan makhluk mistis, plotnya berputar disekitar asal muasal benda-benda atau disekitar makna benda-benda, dan settingnya adalah dunia metafisik yang dilawankan dengan dunia nyata. Lebih lanjut dijelaskan oleh Danesi bahwa pada awal kebudayaan manusia, mitos berfungsi sebagai teori asli mengenai dunia. Lebih lanjut dikutip penjelasan Durkheim tentang mitos dengan menyatakan bahwa mitos muncul sebagai respon-respon emosional terhadap eksistensi social, yang juga menghasilkan suatu kode moral narasi dan suatu sistem penalaran historis. Mitos dan ritual berasal dari kedua hal tersebut yang kemudian mempertahankan dan memperbaharui sistem moral, menjaganya supaya tidak dilupakan dan mengikat manusia secara sosial.

Sementara Tudor (1984) menjelaskan bahwa istilah mitos (*Myth*) mengacu pada setiap kepercayaan yang tidak berlandaskan kenyataan. Suatu mitos merupakan fiksi atau ilusi, produk fantasi, ***wishful thinking*** dan bukan hasil suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menggumuli dunia di mana kita hidup. Ernst Cassirer (Tudor, 1984 : 25 – 26) menjelaskan bahwa mitos merupakan suatu dunia bentuk-bentuk simbolik yang koheren dan swasembada. Mitos ini terungkap dalam dongeng-



dongeng suci, praktek-praktek totemik, magi, astrologi, dan ritual. Mitos mencakup suatu pendekatan yang total terhadap pengalaman yang menjadi karakteristik kebudayaan-kebudayaan yang sangat purba atau sangat primitif.

Lebih lanjut Sorel (Tudor, 1984) menjelaskan bahwa ciri suatu mitos ialah memberikan suatu visi tentang masa depan yang membuat masa kini mempunyai makna dan praktis. Ia memberikan kepada mereka yang mempercayainya suatu titik acuan yang tetap untuk menyatakan perasaan-perasaan mereka dan menjelaskan pengalaman mereka. Yang tipikal ialah bahwa setiap konflik di masa kini dilihat sebagai sebagai suatu pendahulu dari bagi pertarungan yang menentukan, yang ditakdirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Mitos menggambarkan masa depan, tidak sebagai tatanan sosial yang mungkin, melainkan sebagai suatu peristiwa malapetaka. Mitos bukan deskripsi tentang hal-ihwal, melainkan ungkapan suatu tekad untuk bertindak. Apa yang dikemukakan Sorel ini dapat kita pahami dalam konteks keindonesiaan, khususnya penduduk asli di pulau Jawa, yakni tentang ramalan *Joyoboyo* (Jayabaya), yang antara lain menyatakan bahwa akan ada goro-goro (tragedi kemanusiaan) yang akan memunculkan Ratu Adil yang memimpin masyarakat menuju kemakmuran.



Dalam Fiske (2006 : 121-126) dikatakan bahwa bagi Barthes mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu. Cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mitos menaturalisasi sejarah. Ini menunjukkan bahwa mitos merupakan produk kelas social yang mencapai dominasi melalui sejarah tertentu, tapi dalam operasinya mitos menyangkal hal tersebut dan menunjukkan bahwa maknanya alami dan tidak bersifat histories atau sosial. Jadi mitos memistifikasi atau mengaburkan asal-usulnya. Selain itu, mitos dapat berubah dan beberapa di antaranya dapat berubah dengan cepat guna memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-nilai cultural dimana mitos itu menjadi bagian dari kebudayaan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Lippmann (1998) bahwa dengan mitos, seseorang meyakinkan dirinya sendiri untuk mengambil sikap serba tahu, maha tahu, meskipun ia tidak memiliki kriteria jelas untuk menyatakan benar salah, fakta dan dongeng, laporan dan fantasi, semua dianggap sama saja tingkat kredibilitasnya. Dijelaskan bahwa mitos tidak selalu salah. Mungkin benar seluruhnya. Mungkin hanya sebagian benar. Jika mitos dalam waktu yang relatif lama mempengaruhi tingkah laku manusia, mitos itu hampir pasti mengandung banyak kebenaran yang mendalam dan penting. Namun mitos tidak memiliki daya kritis untuk memisahkan



yang benar dan salah, karena dianggap luhur dan agung, sehingga tidak seorang pun layak memberikan opini dan penilaiannya terhadap mitos, sekalipun opini itu benar. Mitos terlalu mulia untuk diuji lewat bukti-bukti empiris.

Sehingga secara awam, mitos dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan turun temurun dari suatu kelompok masyarakat tertentu tersebut dan dipercayai benar dengan sumber yang kebanyakan tak teridentifikasi (mistis). Selain itu, dapat dikatakan bahwa mitos merupakan idea tentang dunia kehidupan masa depan yang ada dalam alam pikir manusia sekarang. Sehingga faham-faham tentang bagaimana dunia beroperasi dimasa yang akan datang, atau dengan kata lain, bagaimana tatanan sosial ke depan, atau lebih populer disebut sebagai "ideologi", dapat dikategorikan sebagai mitos.

Sebagaimana Adorno dan Horkheimer (Hardiman, 1990 : 63 -64) memahami mitos sebagai pengetahuan rasional, tetapi pengetahuan rasional yang bangkit di dalam mitos tak lain adalah mitos baru. Dijelaskan bahwa prosedur pemikiran positifis dan matematis di analogikan sama dengan ritual-ritual mistis. Pemikiran matematis tersebut merupakan ritus. Seperti pemikiran mistis, pemikiran yang tunduk pada hukum matematis tersebut bersifat buta, tidak kritis dan dibatasi repetisi. Jika lewat *mimesis* manusia mitis membekukan gambaran dunianya



sehingga mereka terkungkung di dalamnya, dalam pemikiran repetitif manusia rasional mempertahankan *status quo* cara berpikirnya sehingga dunia dan kehidupan dihadapinya secara positivistik. Dengan cara ini juga manusia rasional membekukan gambaran dunianya menjadi ideologis.

Menurut Thompson (2004 : 17 – 19) “Ideologi” adalah sebuah konsep yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang menjadikan konsep ini memiliki makna yang ambigu, yakni memiliki penggunaan makna yang berbeda. Selain kesejarahan, terdapat faktor lain yang membuat ambiguitas konsep ideology tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat dua respon umum terhadap warisan ambigu konsep ideology. Konsep pertama melihat ideology sebagai ‘sistem pemikiran’, ‘sistem keyakinan’, atau ‘sistem simbol’ yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktek politik. Pada konsep ini dilukiskan dan digambarkan sistem pemikiran dan keyakinan utama yang menjiwai tindakan social dan politik, yang ditunjukkan oleh adanya kecenderungan melihat ideology berdasarkan istilah “isme”. Respon kedua diarahkan untuk membuang konsep tersebut, karena dianggap konsep ideology ini sangat erat dihubungkan dengan Marxisme. Konsep ini dikembangkan untuk analisis sosial dan politik.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Thompson (2004) menawarkan menawarkan konsep ideology dengan tetap mengadopsi respon pertama



yang mengfokuskan pada kumpulan persoalan yang berhubungan dengan inter-relasi antara makna dan kekuasaan, yaitu merujuk pada cara-cara bagaimana makna digunakan, dalam hal tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan yang secara sistematis bersifat asimetris – disebut 'relasi dominasi'. Sehingga secara luas ideology adalah makna yang digunakan untuk kekuasaan.

Sementara Barker (2000 : 67) menyatakan bahwa melihat perbedaan pandangan dalam memahami ideologi, maka beberapa cara untuk melihat ideologi, yakni:

- Pandangan dunia kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan dan yang setara dengan kebenaran;
- Pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka dan yang setara dengan kebenaran;
- Pandangan dunia kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan mereka tetapi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran: namun ia dapat menjadi subjek deskripsi ulang sehingga tidak harus diterima;
- Pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka tetapi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran: namun, ia bisa menjadi subjek deskripsi ulang sehingga tidak harus diterima.



Lebih lanjut dijelaskan bahwa terlalu lemah menyetarakan konsep ideologi dengan kebenaran dan bahwa semua kelompok sosial memiliki ideologi. Dijelaskan bahwa ideologi tidak dapat dilihat sebagai alat dominasi yang sederhana namun harus dilihat sebagai diskursus yang mengandung konsekuensi spesifik terhadap relasi kekuasaan pada semua level hubungan sosial (termasuk justifikasi dan pemeliharaan kelompok berkuasa).

Dalam menjelaskan pandangan Teori Kritis tentang ideologi, dikatakan oleh Fairclough (2005 : 9) antara lain bahwa pandangan kritis berbeda dengan pandangan yang menggambarkan ideology sebagai suatu posisi tertentu, sikap, kepercayaan, sudut pandang atau semacamnya, dari suatu kelompok sosial, dengan tidak mengaitkannya pada kuasa dan dominasi di dalam suatu kelompok. Dikatakan bahwa:

Ideologies are representation of aspect of the world which can be shown to contribute to establishing, maintaining and changing social relations of power and domination between such group.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ideologi dapat dikenali melalui teks. Ideology tersebut merupakan representasi yang dapat terlihat melalui relasi social yang merujuk pada adanya kuasa dan dominasi. Dijelaskan Fairclough (2005 : 21 – 22) bahwa teks merupakan bagian dari aktifitas social, dan bukan hanya menyangkut wacana lisan atau tulisan (verbal)



dalam suatu interaksi social atau tindakan seseorang, tetapi juga tindakan-tindakan non verbal lainnya.

Sementara menurut Habermas (Fauzi, 2003 : 54 – 55) sikap bebas nilai sebagaimana konsep dalam pandangan tradisional bukan sebagai pendirian ilmiah tetapi merupakan pendirian ideologis, yakni sifat teori yang ingin menerima dan membenarkan kenyataan sebagai apa adanya dengan pelbagai kedok atau dalih ilmiah untuk menutupi ketidakmampuannya dalam mengubah keadaan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendirian ideologis tersebut bisa membawa akibat-akibat langsung terhadap ilmuwan. Berdasarkan hal tersebut, ideologi dipahami Habermas sebagai kepercayaan, norma atau nilai yang dianut dan dikenal sebagai *world view* (dunia kehidupan), tetapi juga sekaligus merupakan suatu sudut pandang tertentu dalam melihat realitas sosial. Dalam hubungannya dengan peneliti ilmuwan sosial, ideologi sekaligus mempengaruhi pemilihan tentang apa yang dilihat dan bagaimana memandangnya. Keterlibatan emosional yang kuat terlihat jelas, dan karenanya penelitian yang bebas nilai adalah ilusi.

Uraian ini menjelaskan bahwa ideology merupakan merupakan produk kelas social tertentu yang digunakan sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan atas kelas social lainnya secara asimetris dengan cara penggunaan makna-makna atau symbol-



simbol tertentu yang mewakili ideology tersebut, dalam suatu interaksi social, secara terus-menerus dalam suatu ruang yang mampu menghadirkan semua kelas dalam suatu kelompok social tertentu. Dihubungkan dengan penelitian ini maka dapat dikata bahwa Warung Kopi yang berada di berbagai tempat di kota Makassar, sebagai suatu 'ruang interaksi' merupakan tempat yang ideal bagi produksi, re-produksi dan distribusi serta konsumsi makna atau symbol ideology tertentu. Demokrasi<sup>21</sup> dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah ideology karena dalam konsep ini mengandung makna relasi kekuasaan. Demikian halnya dengan konsep ***Tudang Sipulung***, yang oleh sebagian masyarakat Bugis – Makassar dimaknai sebagai salah ciri dari sikap demokrasi yang melekat dalam diri individu masyarakat tersebut, karena merupakan bagian dari budaya mereka. Persoalannya ialah demokrasi yang bagaimana? Atau bagaimana konsep ***Tudang Sipulung*** dimaknai sebagai sikap Demokrasi, dan bagaimana konsep itu dipahami sebagai bagian dari sejarah dan sikap hidup masyarakat Bugis - Makassar? Dan apakah ada jaminan, tidak terjadi distorsi komunikasi atau hegemoni dari suatu kelompok tertentu dalam ruang publik (warung kopi) tersebut yang diidentifikasi sebagai sebagian dari masyarakat Bugis – Makassar yang

---

<sup>21</sup> kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa, (Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, gramedia Pustaka, Cetakan ke 21, 2000, hal 50)



merupakan jelmaan dari konsep ***Tudang Sipulung*** yang telah mengalami modernisasi?

Untuk menjelaskan gejala diskusi di warung kopi di kota Makassar tersebut, Habermas menjelaskan campuran tiga minat utama dalam masyarakat, yakni Pekerjaan, interaksi, dan kekuasaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa (Littlejohn & Foss, 471 : 475) *Pekerjaan*, terdiri atas usaha-usaha untuk menciptakan sumber-sumber materi. Bersifat instrumental, melaksanakan tugas untuk menuntaskan tujuan. Pekerjaan pada dasarnya adalah sebuah ketertarikan tehnik, melibatkan rasionalitas instrumen dan disajikan dengan analisis empiris ilmu pengetahuan. Minat terhadap *interaksi* merupakan kegunaan dari bahasa dan sistem simbol komunikasi lainnya. Kerjasama sosial sangat penting untuk bertahan hidup, sehingga hal ini dinamai sebagai *minat praktik (practical interest)*. Minat ketiga ialah *kekuasaan*. Dijelaskan bahwa aturan sosial dengan sendirinya membawa penyebaran kekuasaan, tetapi kita juga tertarik untuk lepas dari dominasi. Kekuasaan menyimpangkan komunikasi, namun dengan menjadi awas terhadap ideologi yang mendominasi masyarakat, kelompok dapat memperkuat diri mereka sendiri untuk mengubah masyarakat. Sebagai akibatnya, kekuasaan adalah sebuah "emansipasi minat". Hal ini tergambar pada tabel 2 berikut ini.



**Tabel 2**  
**Tiga Minat Masyarakat**

<i>Jenis</i>	<i>Sifat Minat</i>	<i>Rasionalitas</i>	<i>Hubungan Ilmu</i>
Pekerjaan	Tehnis	Instrumental	Ilmu Empiris
Interaksi	Praktis	Praktikum	Sejarah/Hermeneutika
Kekuasaan	Faktor emansipasi	Cermin diri	Teori Kritis

**Sumber: Littlejohn & Foss, 2008**

Dikatakan bahwa tidak ada aspek kehidupan yang bebas dari ketiga minat tersebut. Perhatian seseorang terhadap aspek tertentu dari ketiga minat tersebut, dalam sebuah masyarakat yang berubah dan bebas dari dominasi, menjadi tidak penting. Sebab setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lingkungan yang kuat, terpisah dari minat pribadi, hal yang memastikan bahwa negara telah berbuat adil. Habermas prihatin dengan dominasi minat teknis dalam masyarakat kapitalis kontemporer. Dalam masyarakat seperti itu, jalinan pribadi dan publik merupakan sektor publik yang tidak dapat bertahan dalam memerangi tekanan pribadi, minat teknis. Idealnya, pribadi dan publik sebaiknya seimbang dan sektor publik harus cukup kuat untuk menyediakan sebuah iklim bebas dalam mengekspresikan idea-idea dan debat. Dalam masyarakat modern, iklim ini lumpuh.

Menurut Littlejohn dan Foss (2008) penjelasan ini merupakan penilaian Habermas terhadap komunikasi sebagai emansipasi yang penting karena bahasa alat pemenuhan minat kebebasan. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kopetensi



melibatkan pengetahuan dalam bagaimana bertutur yang tepat supaya dapat meraih tujuan yang membutuhkan pemaksaan argumentasi.

Lebih lanjut, dalam konteks komunikasi Habermas mengadakan pengelompokan yang makin tajam mengenai kedua tindakan dasar manusia itu sehingga menjadi suatu teori tindakan (Hardiman, 1990 : 89). Menurutnya tindakan-tindakan dasar dapat dilaksanakan dalam dunia fisik atau non-sosial maupun dalam dunia sosial manusia. Dari segi pelaku tindakan, pelaku tindakan rasional-bertujuan (strategis) memiliki *orientasi pada sukses*. Gagal atau berhasilnya suatu tindakan diukur dari sejauhmana keberhasilannya dalam mewujudkan suatu tujuan. Sejauh tindakan ini memasuki dunia alamiah dengan memenuhi aturan-aturan teknis tertentu, tindakan itu dapat disebut *instrumental*. Jika tindakan ini memasuki dunia sosial, tindakan ini menjadi *strategis* dengan memenuhi aturan-aturan bagi pemilihan rasional. Dengan demikian tindakan strategis adalah tindakan rasional-bertujuan yang dikategorikan dalam interaksi sosial pula, hanya dalam hal ini interaksi tidak bersifat *genuine*. Suatu interaksi yang bersifat *genuine* adalah interaksi yang dilakukan dalam tindakan-tindakan komunikatif. Pelaku tindakan komunikatif memiliki *orientasi pada pencapaian pemahaman*. Dalam hal ini, sukses tidak menjadi ukuran, dan tindakan ini tidak bersifat egosentris.



Keberhasilan tindakan justru tampak pada tercapainya saling pemahaman kedua belah pihak komunikasi. Lebih jelasnya terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Perbedaan tindakan komunikatif dan tindakan rasional bertujuan**

	Kerangka kerja institusional:interaksi simbolis	Sistem-sitem tindakan rasional bertujuan (Instrumental dan strategis)
Aturan-aturan yang mengorientasikan tindakan	Norma-norma sosial	Aturan-aturan teknis.
Taraf Defenisi	Bahasa sehari-hari yang dilaksanakan secara inter – subyektif	Bahasa yang bebas konteks
Mekanisme-mekanisme kemahiran	Internalisasi peran	Mempelajari keahlian-keahlian dan kecakapan-kecakapan
Fungsi Macam tindakan	Pemeliharaan pranata-pranata (Kepatuhan pada norma-norma atas dasar desakan timbal balik)	Pemecahan masalah (Pencapaian tujuan, ditentukan di dalam relasi-relasi sarana tujuan)
Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan	Hukuman atas dasar sanksi-sanksi konvensional: kegagalan melawan otoritas	Ketidak-suksesan; kegagalan dalam kenyataan.
'Rasionalisasi	Emansipasi, individuasi, perluasan komunikasi bebas dari penguasaan	Perkembangan kekuatan-kekuatan produksi, perluasan kekuasaan, kontrol tehnis.

Sumber : Hardiman, 2003 : 88

Mengenai tindakan strategis lebih lanjut dijelaskan (Hardiman, 1990 : 90) bahwa suatu tindakan strategis bisa bersifat terbuka maupun tersembunyi. Di dalam suatu interaksi, para pelaku tindakan strategis bisa dengan sadar menipu pihak lain sehingga menjadi manipulasi. Akan tetapi, di dalam interaksi pelaku bisa dengan sadar menipu diri mereka sendiri seakan-akan tidak bertindak secara strategis sementara menampakkan diri mereka seolah-olah ingin mencapai saling



pemahaman. Jika ini yang terjadi maka terjadilah apa yang disebut sebagai '*komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.*' Mengenai hal ini digambarkan dalam skema gambar 2 pada bagian sebelumnya.

Jadi tindakan manusia paling dasar (Hardiman, 2003) ialah tindakan komunikatif atau interaksi; Tujuan komunikasi ialah tercapainya konsensus (dalam buku lain disebut "pencapaian pemahaman); Rasionalitas komunikatif tercapai dalam saling pengertian. Ada subsistem tindakan berasionalitas sasaran (instrumental), yakni jika diarahkan kepada alam disebut pekerjaan; kalau diarahkan pada manusia, disebut sebagai tindakan strategis. Tujuan tindakan instrumental ialah agar sasaran tercapai.

Habermas menemukan bahwa sifat dasar bahasa ialah sebagai sarana komunikasi. Maksudnya ialah baik pembicara maupun pendengar dalam suatu pembicaraan secara apriori berminat untuk saling memahami. Saling memahami berarti konsensus. Kesepakatan atau konsensus mensyaratkan adanya pengenalan antarsubjektif terhadap keabsahan ujaran kawan bicara. Ini berarti bahwa bahasa bersifat hermeutik, yaitu interpretasi partisipan pada setiap ujaran.

Dalam pengantar buku Teori Tindakan komunikasi I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, lebih lanjut di jelaskan oleh McCharty (2009) bahwa Habermas berargumen bahwa kemampuan manusia dalam



berkomunikasi memiliki inti yang universal –struktur dasar dan aturan fundamental yang dikuasai seluruh subjek dalam belajar berbicara dengan suatu bahasa. Kompetensi komunikasi bukan hanya soal kemampuan memproduksi kalimat-kalimat gramatikal. Dalam berbicara kita menceritakan diri kita kepada dunia, kepada subjek lain, tentang maksud, perasaan dan hasrat-hasrat kita. Pada masing-masing dimensi tersebut kita selalu mengklaim validitas yang dikatakan, maksudkan, kita yakini. Misalnya, klaim atas kebenaran dari apa yang kita katakan menyangkut dunia obyektif; atau klaim tentang ketepatan, kesesuaian atau legitimasi wicara kita tentang nilai-nilai dan norma-norma bersama dunia kehidupan kita; atau klaim kejujuran atau autentitas ekspresi-ekspresi manifestasi maksud dan perasaan kita. Klaim-klaim semacam ini dapat diperdebatkan dan dikritik, dipertahankan atau direvisi, dan ada banyak cara untuk mengakhiri klaim yang saling berlawanan; misalnya dengan menggunakan otoritas, tradisi atau paksaan. Namun untuk mengembangkan gagasan tentang rasionalitas Habermas fokus pada pengalaman tentang pencapaian pemahaman timbal balik dalam komunikasi yang bebas dari paksaan. Dijelaskan bahwa kata kunci dari konsep tentang pencapaian pemahaman (konsensus) adalah kemungkinan dan kesempatan menggunakan alasan atau dasar demi



memperoleh pengakuan intersubjektif atas klaim-klaim validitas yang dapat dikritik.

Warung kopi di berbagai kota besar di Nusantara, pada awalnya dikenal sebagai tempat “nongkrong” para lelaki dewasa untuk membicarakan berbagai hal, mulai dari hal-hal yang ringan dan bersifat privat, sampai ke hal yang berat dan bersifat publik. Di Kota Makassar, sekitar tahun 60-an sampai dengan 80-an, warung kopi dikenal sebagai tempat para lelaki melepas penat sambil mengonsumsi minuman keras. Sejalan dengan perjalanan kota, dan berkembangnya issue demokratisasi di Indonesia, beberapa kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di beberapa kota, seperti Banda Aceh, Bengkulu, Pontianak, dan Makassar memanfaatkan warung kopi tersebut sebagai tempat diskusi tentang berbagai hal.

Reformasi pada 1998 membawa perubahan besar dalam kebebasan masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap diskusi-diskusi yang dikembangkan kelompok-kelompok Ornop (LSM) di berbagai kota di Nusantara. Termasuk di dalamnya di kota Makassar, Sulawesi selatan. Warung kopi yang tadinya hanya tempat berkumpul untuk membahas berbagai hal hanya secara permukaan (Non-substansi) berubah menjadi arena diskusi yang teragendakan, mendalam, dengan hasilkan berbagai



penawaran solusi terhadap berbagai masalah atau isue yang sedang berkembang.

Kebiasaan mendiskusikan berbagai hal bagi masyarakat Bugis – Makassar (terutama masyarakat Bugis) merupakan keseharian mereka. Artinya, hal ini sudah mengakar pada budaya mereka. Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam budaya Bugis – Makassar di kenal suatu budaya pertemuan antara para pihak, yakni **‘Tudang Sipulung’**. Pertemuan tersebut membahas berbagai isue atau kejadian yang terjadi dalam masyarakat, beserta solusinya. Alkisah pada suatu waktu ( Said, 2008), masyarakat Bugis mengalami gagal panen, maka berkumpullah para pihak untuk membicarakan masalah tersebut beserta solusinya. Ternyata, ditemukan bahwa *biang* masalah adalah anak raja, maka salah satu solusi yang dihasilkan adalah memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada anak raja tersebut, dan hal itu dilaksanakan. Kisah lainnya tentang **‘Tudang Sipulung’**; pada suatu masa, masyarakat Bugis – Makassar mengalami rentetan bencana selama satu tahun. Berkumpullah para pihak membicarakan hal tersebut dan solusi yang akan disepakati. Hasil permufakatan menyimpulkan bahwa raja banyak berbuat kesalahan selama pemerintahannya. Solusi yang diberikan adalah menurunkan raja



dari takhtanya, dan yang disepakati sebagai penggantinya bukanlah keturunan raja (anak raja) tersebut, melainkan saudara misannya.<sup>22</sup>

Jika dihubungkan dengan gejala warung kopi di kota Makassar, Qudri<sup>23</sup> menjelaskan bahwa ngobrol-ngobrol di warung kopi merupakan jelmaan dalam bentuk lebih lanjut dari adat '**Tudang Sipulung**'. Meskipun kebiasaan tersebut masih ada, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), namun terbatas hanya membicarakan masalah "waktu yang tepat untuk bercocok tanam". Berbeda dengan yang terjadi di warung Kopi, berbagai persoalan dan solusi di bicarakan, tujuannya ialah demokrasi yang lebih substansial. Artinya, ada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari diskusi tersebut, dan menjadi agenda bersama peserta diskusi untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Menurut Said (2008 : 51) cara manusia Bugis (termasuk Makassar – pen) mempertahankan tradisi adat mereka, dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kerabat, dan dalam interaksi sosial di masyarakat. Hal ini ditandai dengan keteguhannya dalam memegang suatu hasil kesepakatan (konsensus –pen), dan konsekuen terhadap apa yang telah diucapkan, dan berani menghadapi segala macam tantangan yang merugikan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Andi Pakerrangi, 12 November 2010, di Depok, Jawa Barat.

<sup>23</sup> *Op.Cit.*



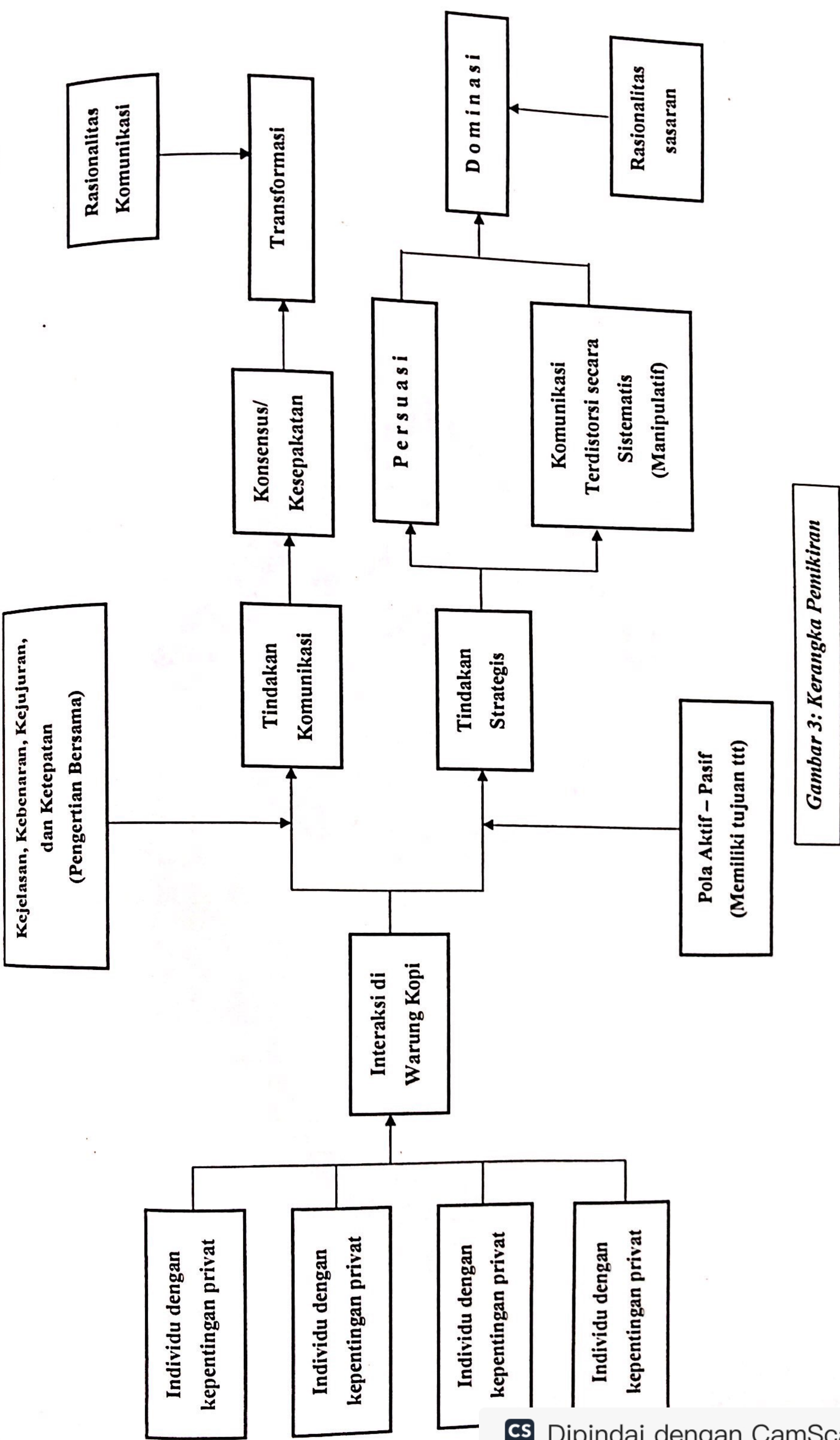
Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat dikatakan bahwa Warung Kopi di Kota Makassar, dapat saja merupakan ruang publik yang ideal, tempat dimana para pihak membicarakan pelbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan Budaya, dan terjadi pengenalan antarsubyektif terhadap keabsahan kata-kata dan kalimat (ujaran) dalam bentuk simbol-simbol yang disampaikan kawan bicara di antara partisipan yang terlibat dalam proses tersebut. Ini berarti bahwa terjadi interpretasi partisipan pada setiap kata-kata dan kalimat (ujaran) dalam proses tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa empat klaim: **Kejelasan, Kebenaran, Kejujuran, dan ketepatan (pengertian bersama)**, terjadi dalam proses komunikasi dalam warung kopi tersebut, sehingga diperoleh konsensus atau kesepakatan bersama, sehingga terjadi rasionalitas komunikasi antara *state* dan *civil society*, bukan sebagai arena penciptaan mitos baru. Jika yang terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan bahwa Warung Kopi sebagai ruang komunikasi sosial yang merupakan media masyarakat sipil (yang direpresentasikan oleh kelompok-kelompok LSM setempat) dalam melakukan hegemoni tandingan terhadap kekuatan kekuasaan formal.

Namun selain bentuk tersebut, dapat saja Warung Kopi di kota Makassar oleh kelompok dominan dijadikan ruang untuk melanggengkan mitos-mitos sosial, politik, ekonomi dan budaya, guna memperkuat dan melanggengkan dominasi terhadap kelompok lainnya, melalui penciptaan



simbol-simbol yang dipertukarkan dalam interaksi baik dengan secara terbuka (berupa tindakan-tindakan penekanan baik secara fisik maupun psikologis) ataupun dengan cara tersembunyi, yakni dengan cara manipulatif (penipuan secara sadar) atau penipuan secara tak sadar dan melakukan distorsi komunikasi. Hal ini diskemakan pada gambar 3 berikut.





Gambar 3: Kerangka Pemikiran



### **BAB III METODOLOGI**

#### **a. Etnometodologi**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode etnometodologi, suatu aliran sosiologi Amerika yang lahir pada tahun 60-an. Etnometodologi banyak dikenal melalui tulisan Harold Garfinkel dengan judul ***Studies in Ethnomethodology***, yang terbit pada 1967 (Coulon, 2008). Dikatakan oleh Schutz bahwa etnometodologi lahir dengan idea yang menyatakan bahwa kita semua adalah 'sosiolog praktik'. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahasa menceritakan dan mengungkapkan kenyataan sosial, mendeskripsikan dan membentuknya sekaligus.

Lebih lanjut, realitas sosial dijelaskan oleh Schutz (Coulon, 2008) merupakan keseluruhan obyek dan kejadiankejadian di dunia kultural dan sosial, yang hidup oleh pikiran manusia dengan sejumlah interaksi. Itu adalah dunia obyek kultural dan institusi sosial di mana kita semua lahir, saling mengenal, saling berhubungan. Sejak awal para aktor panggung sosial, menjalani hidup sebagai suatu dunia budaya sekaligus dunia alam, bukan sebagai suatu dunia pribadi, tetapi dunia antar subyektif. Artinya sebagai suatu dunia untuk kita semua, yang dibentangkan di hadapan kita atau yang secara potensial



dapat dinikmati oleh siapa saja, berimplikasi terhadap komunikasi dan bahasa. Ditambahkan oleh Holstein dan Gubrium (dalam Denzin dan Lincoln, 1997), 'fakta sosial' tercipta karena adanya tindakan dari setiap anggota masyarakat –aktifitas yang menjadi wahana bagi aktor untuk memproduksi dan mengorganisasikan kondisi dalam suatu kehidupan sehari-hari.

Garfinkel dan Sacks (dalam Coulon, 2008) menyatakan bahwa "fakta sosial adalah pelaksanaan tindakan para anggota." Realitas sosial selalu diciptakan oleh para aktor, dan bukan suatu data yang sudah ada sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan praktik para anggota (aktor) akan dapat diamati dan dideskripsikan. Pengamatan yang cermat dan analisis proses yang dilaksanakan, memungkinkan pengungkapan aturan dan prosedur dari para aktor, untuk menginterpretasi secara terus-menerus realitas sosial dan menemukan perbaikan hidup. Singkatnya, bagaimana mereka membangun dunia yang "masuk akal" (*un monde "raisonnable"*) agar dapat hidup di dalamnya.

Holstein dan Gubrium (dalam Denzin dan Lincoln, 1997), menyatakan bahwa peneliti etnometodologi hendaknya memusatkan perhatian pada bagaimana setiap anggota dapat menciptakan, mengolah, dan mereproduksi 'rasa' akan struktur sosial. Analisis



difokuskan pada sifat penalaran praktis dan kerja dasar/konstitutif yang menghasilkan wujud realitas yang stabil dan tidak terbantahkan, sambil tetap menolak pertimbangan apakah aktifitas setiap anggota benar atau keliru. Hal ini dijelaskan oleh Schutz (Coulon, 2008) dengan membuat analogi tentang penonton sepak bola. Singkatnya, dijelaskan bahwa setiap orang pada saat menyaksikan pertandingan yang sama dari sudut yang berbeda, akan menyatakan bahwa mereka menyaksikan hal yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika para aktor (penonton) mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan hal yang sama, dapat mengganggu pengetahuan antar subyek (realitas sosial). Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Berkat dua 'idealisisasi' yang digunakan para aktor tersebut, yakni idealisasi tentang pertukaran sudut pada di satu pihak, dan idealisasi penyesuaian sistem pembeda di dipihak lain, terbentuklah realitas. Sehingga dikatakan bahwa kedua idealisasi tersebut, merupakan "tesis umum dari resiprokasi perspektif", yang menandai karakter sosial dari struktur dunia kehidupan.

Dalam etnometodologi, menurut Zimmerman dan Wieder sebagai mana dikutip oleh Holstain dan Gubrium (dalam Denzin dan Lincoln, 1997) penekanannya pada penjelasan bagaimana setiap anggota mengenali, menjelaskan, menguraikan, dan



mempertimbangkan aturan kehidupan mereka sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan oleh Pollner bahwa setiap anggota tergantung pada kapasitas interpretif partisipan lainnya dalam interaksi. Sehingga partisipan dapat merangkai dan menyingkap rasa akan tatanan/keteraturan yang hadir secara lokal. Struktur sosial diproduksi, dipertahankan, dan dialami secara lokal sebagai lingkungan yang normal. Dengan demikian (Holstein dan Gubrium dalam Denzin dan Lincoln, 1997), realitas diproduksi 'dari dalam', melalui prosedur interpretif setiap anggotanya, lingkungan sosial setiap anggota 'dapat berkembang dengan sendirinya'.

Fakta ini memunculkan makna esensial (konsep kunci)<sup>24</sup> analisis etnometodologi, yakni makna yang bersifat 'leksikal' dan makna yang bersifat 'mengembangkan dirinya sendiri' (refleksivitas - *reflexivite*)<sup>25</sup>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makna **leksikal**, yakni makna yang sepenuhnya tergantung pada konteks. Tanpa konteks yang jelas, makna obyek dan peristiwa akan kabur/ambigu atau tidak pasti. Obyek dan peristiwa hanya akan dapat benar-benar bermakna konkrit ketika digunakan dalam percakapan atau interaksi. Makna **refleksivitas**, maksudnya ialah aktifitas interpretif selalu 'di dalam' sekaligus 'tentang' setting/konteks yang menjadi acuannya.

---

<sup>24</sup> Coulon, 2008 : 31 - 44

<sup>25</sup> Ibid.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2007  
***Teori Sosial Kritis, Kritik – Penerapan dan – Implikasinya***,  
(Terjemahan : Nurhadi), Kreasi wacana, Yogyakarta.
- Arge, Rahman. 2007  
***Permaianan Kekuasaan***, Rumah Karya Arge, Jakarta.
- Barker, Crish. 2000  
***Cultural Studies, Theory and Practice***, Sage Publications, London.
- Coulon, Alain. 2008  
***Etnometodologi***, (Alih Bahasa: Jimmy Ph), Yayasan Lengge dan KSKS, Ampenan – Jakarta.
- Culla, Adi Suryadi. 2006  
***Rekonstruksi Civil Society; Wacana dan Aksi Ornop Indonesia***,  
YLBHI – WALHI – LP3ES, Jakarta.
- Danesi, Marcel. 2010  
***Pesan, Tanda, dan Makna***, (Alih Bahasa: Evi Setyarini dan Lusi Lian Piantari), Jalasutra, Yogyakarta.
- Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. (ed.). 2009  
***Handbook Qualitatif Research***, (Alih Bahasa: Dariyatno dkk.),  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eriyanto. 1999.  
***Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat***, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001.  
***Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media***, LKiS,  
Yogyakarta.
- Fairclough, Norman. 1998.  
***Critical Discourse Analysis; The Critical Study of Language***,  
Addison Wesley Longman Inc., New York.



- \_\_\_\_\_. 2005.  
***Analising Discourse; Textual Analysis for Social Research***,  
Routledge, New York.
- Fauzi, Ibrahim Ali. 2003  
***Jurgen Habermas***, Teraju, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2007  
***Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Refleksi Pemikiran  
Pierre Bourdieu***, Juxtapose, Yogyakarta
- Fiedler, Klaus (ed.), 2007  
***Social Communication***, Psychology press, New York
- Fiske, John. 2006  
***Cultural and Communication Studies***, (Alih Bahasa : Yosol Iriantara  
dan Idi Subandi Ibrahim), Jalasutra, Yogyakarta
- Habermas, Jürgen. 2009.  
**Teori Tindakan Komunikatif I; Rasio dan Rasionalitas Masyarakat**,  
(Alih Bahasa: Nurhadi), Kreasi Wacana, Bantul.
- \_\_\_\_\_. 2009.  
***Teori Tindakan Komunikatif I; Kritik atas Rasio Fungsionalis***, (Alih  
Bahasa: Nurhadi), Kreasi Wacana, Bantul.
- \_\_\_\_\_. 1997  
***The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry  
into a Category of Bourgeois Society***, Cambridge Massachusetts:  
The MIT Press
- \_\_\_\_\_. 1975  
***Krisis Legitimasi***, (terjemahan: Yudi Santoso), Qalam, Yogyakarta
- Hardiman, F Budi. 1990  
***Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan***, Pustaka  
Filsafat Kanisius, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2003  
***Menuju Masyarakat Komunikatif***, Pustaka Filsafat, Kanisius, Jakarta



Hidayat, Dedy N. 2002

**Paradigma dan Metodologi Penelitian**, (Makalah Pelatihan Reset Komunikasi, disampaikan pada 20 – 23 Agustus 2002), Pusat kajian Komunikasi, FISIP – UI.

Juliawan, B Hari. 2003

**Ruang Publik Habermas, Solidaritas Tanpa Intimitas**, Jurnal Basis, No 11 – 12 Tahun ke -53, November – Desember, Jakarta.

Latif, Yudi dan Ibrahim, Idi Subandi (ed). 1996

**Bahasa dan kekuasaan; Politik Wacana Di Panggung Orde Baru**, Mizan, Bandung.

Lechte, John. 2007

**50 Filsuf Kontemporer, dari Strukturalisme sampai Postmodernitas**, (terjemahan : Gunawan Admiranto), Pustaka Filsafat Kanisius, Jakarta

Lippmann, Walter. 1988

**OPINI UMUM, Antara Rekayasa dan Realitas**, (Alih bahasa: S Maimoen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. 2009

**Teori Komunikasi**, (Alih bahasa: Mohammad Yusuf Hamdan), Humanika Salemba, Jakarta.

Mangara, Andy dan Mohammad Syafei. 2008

**Demokrasi dari Warung Kopi**, Gora Pustaka Indonesia bekerjasama dengan Bhakti, Makassar.

Marijan, Kacung. 2010.

**Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde Baru**, Kencana Predana Group, Jakarta

McCarthy, Thomas. 1994

**The Critical Theory of Jurgen Habermas**, The MIT Press, Massachussetts, USA.

Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992

**Analisis Data Kualitatif**, (Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi), Universitas Indonesia, Jakarta.



- Miller, Katherine. 2005  
***Communication Theories; Perspective, Processes, and Contexts***, McGraw – Hill Companies, Inc., New York.
- Nimmo, Dan. 1989 (a)  
***Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media***, (Alih Bahasa: Tjun Surjaman), CV. Remaja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1989(b)  
***Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek***, (Alih Bahasa: Tjun Surjaman), CV. Remaja Karya, Bandung.
- Parera, Frans M dan Koekerist, T. Jakob (ed.). 1999  
***Reformasi Kehidupan Bernegara; dari Krisis ke Reformasi***, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Salim, Agus. 2001  
***Teori dan Paradigma Penelitian Sosiasl; Pemikiran Norman K Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya***, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Said, Mashadi. 2008.  
***Konsep Jati Diri Manusia Bugis, Sebuah Telaah Filsafati tentang Kearifan Bugis***, Churia Press, Ciputat, Tangerang Selatan.
- Sugiyono. 2007  
***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***, Alfabeta, Bandung.
- Suseno, Frans Magnis. 2006  
***12 Tokoh Etika Abad ke – 20***, Pustaka Filsafat Kanisius, Jakarta
- Rogers, Everett M. 1997  
***A History of Communication Studi; A Biographical Approach***, The Free Press, New York.
- Titscher, Stefan, dkk. 2009  
***Metode Analisis Teks dan Wacana***, (Alih Bahasa : Gazali dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Thompson, John B. 2004

***Kritik Ideologi Global – Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa***, (Alih Bahasa : Haqqul Yaqin), IRCiSoD, Yogyakarta.

Tudor, Henry. 1984

***Mitos dan Ideologi Politik (Konsep-Konsep Kunci)***, (Terjemahan : Hasan Basari), Sangkala Pulsar, Jakarta